



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL

## TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam (M.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**MUHAMMAD YASRI MAR**  
**NIM. 21790215630**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1441H. /2020 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

Nama  
Sumber Induk Mahasiswa  
Bidang Akademik  
Tingkat

Muhammad Yusrizki  
21790215530  
M.H. (Magister Hukum)  
Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim  
Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai  
Kasus Perceraian akibat Media Sosial

Tim Penguji

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.  
Penguji I / Ketua

Dr. Abu Bakar, M.Pd.  
Penguji II / Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
Penguji III

Dr. Zulkayandri, M. Ag  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

29 Mei 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL”**, yang di tulis oleh saudara :

Nama : Muhammad Yasri Mar  
NIM : 217902215630  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 29 Mei 2020

Penguji I

**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.**  
NIP. 19630530 199803 2 001

Tgl: Mei 2020

Penguji II

**Dr. Zulkayandri, M.Ag.**  
NIP.19710105 199903 1 002

Tgl: Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.**  
NIP. 19670822 199803 1 001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL”**, yang di tulis oleh saudari :

Nama : Muhammad Yasri Mar  
NIM : 217902215630  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 29 Mei 2020  
Pembimbing I

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
NIP. 19720628 200501 2 004

  
Tgl: Mei 2020

Pembimbing II

**Dr. Zulfahmi B, M.Ag.**  
NIP. 19670822 199803 1 001

  
Tgl: Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaedi Lubis, M.Ag.**  
NIP. 19670822 199803 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial"** yang ditulis oleh saudara:


Nama : Muhammad Yasri Mar  
NIM : 21790215630  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 19 Februari 2020  
Pembimbing I,

  
**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
NIP. 1958071219860310005

Tanggal: 19 Februari 2020  
Pembimbing II,

  
**Dr. Zulfahmi B, M.Ag**  
NIP. 1972922200501 1 004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Junaedi Lbs, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Muhammad Yasri Mar

Kepada Yth :

**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Muhammad Yasri Mar
NIM	: 21790215630
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang munaqasyah Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum WrWb

Pekanbaru, 19 Februari 2020  
Pembimbing I,



**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

NIP. 19720527199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Zulfahmi B. M.Ag**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Muhammad Yasri Mar

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :


Nama	: Muhammad Yasri Mar
NIM	: 21790215630
Program Studi	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
Judul	: PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
	: KELAS 1A PEKANBARU MENGENAI
	: KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 19 Februari 2020  
Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

  
**Dr. Zulfahmi B. M.Ag**  
NIP. 19670822199803 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Muhammad Yasri Mar  
NIM : 21790215630  
Tempat/tanggal lahir : Air Tiris, 05 Desember 1993  
Program studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Mei 2020  
  
Muhammad Yasri Mar  
NIM. 21790215630



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah Swt. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Sebagai manusia Rahmatan lil alamin.

Pokok-pokok yang tertuang dalam tesis berjudul; **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL** “ ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga terselesainya tesis ini yaitssu kepada :

1. Terimakasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do’a. Ayahanda Tercinta Tongku Raja Lobi Hasibuan, Ibunda tercinta Siti Rahma Harahap, dan seluruh keluarga tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.,MA. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku ketua Prodi Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibuk Dr. Jumni Nelli, M.Ag Selaku Pembimbing I Dalam penulisan Tesis ini
6. Bapak Dr. Zulfahmi B,M.Ag Selaku Pembimbing II Dalam Penulisan Tesis ini
7. Bapak/ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Segenapa teman-teman, sahabat, guru-guru yang selalu mensupport dalam penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kemaslahatan tesis ini.

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
Penulis,

**MUHAMMAD YASRI MAR**  
**NIM : 21790215630**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI (KOP PASCASARJANA)</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PRODI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 2</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK TESIS .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Pembatasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan dan Mafaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Mamfaat Penelitian .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data .....	14
F. Kajian Relevan .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Putusan Hakim Pengadilan .....	19
1. Putusan Hakim Pengadilan .....	19
2. Dasar Hukum Putusan Hakim .....	22
B. Peradilan Islam dalam di Indonesia .....	24
1. Peradilan Agama Masa Kerajaan Islam.....	24
2. Peradilan Agama Masa Kolonial Pra Kemerdekaan .....	27
C. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru .....	30
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	30
2. Tata Tertip Pengadilan Agama .....	39
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	40
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	41
5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru ...	43
6. Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum .....	47
 <b>BAB III KETENTUAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	 <b>52</b>
A. Perceraian dalam Islam .....	52
1. Defenisi perceraian .....	53
2. Dasar Hukum Perceraian .....	54
3. Syarat dan Rukun Perceraian .....	56
4. Hikmah Perceraian .....	59
B. Putusnya Perkawinan dalam Islam .....	61
1. Khulu' .....	61
2. Fasah .....	64
3. Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ....	65
C. Media Sosial .....	74
1. Defenisi Media Sosial .....	74
2. Sejarah Media Sosial dan Perkembangnya .....	75
3. Kegunaan Media Sosial dalam Keluarga.....	78
4. Dasar Hukum Menggunakan Media Sosial menurut HI..	80



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Keluarga dalam Islam .....	81
1. Pengertian Keluarga.....	81
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam .....	85
E. Fungsi Keluarga dalam Sosiologi .....	93
F. Keharmonisan dalam Berkeluarga .....	101

## BAB IV HASIL PENELITIAN .....

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus Perceraian cerai gugat dan cerai thalaq yang diakibatkan oleh Penyalahgunaan Media Sosial.....	106
1. Duduk Perkara .....	107
2. Putusan Hakim cerai gugat dan cerai thalaq.....	116
B. Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru .....	117
C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kasus Perceraian yang diakibatkan oleh Penyalahgunaan Media Sosial Analisis Hukum Islam .....	120

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan		Kepanjangan dari kata
1	swt		Subhanahu wa Ta'ala
2	saw		Shallallahu 'Alaihi Wasallam
3	as		'Alaihissalam
4	Q.S		al-Qur'an Surat
5	h		Halaman
6	t. pn		Tanpa Penerbit
7	t. np		Tanpa tempat penerbit
8	t.t		Tanpa tahun penerbit
9	W		Wafat
10	H.R		Hadits Riwayat
11	r.a		Radiyallahu Anhu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKM) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( *A Guide To Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	ط	Th
17	ظ	Zh
18	ع	,
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	,
29	ي	Y

#### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya ل idajnem *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya ل idajnem *qila*

Vokal (u) panjang = u misalnya نود *duna*

Khusus untuk bacaan *ya nisbat*, maka tidak boleh digantikam dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh :

Diftong (aw)	=	و	misalnya قَوْل idajnem qawlun
Diftong (a)	=	ي	misalnya رِي idajnem ri
khayrun			

#### © Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasi dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya قاتل دمرسة menjadi *al-risalat Li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة اضعك فاملل ditulis *Zakat al-Mal*.

#### D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terketak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

- a. Al-Imam al-Bukhari mengatakan....
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjekaskan....
- c. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun.

Pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr

Ilmiah , t.th), jilid.3. hal. 220



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Yari Mar (2020): “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial.”**

Latar belakang penelitian ini adalah kemajuan media sosial yang begitu besar membawa pengaruh terhadap perceraian rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru. Realitas yang ada perceraian yang terjadi akibat media sosial, fenomena yang menarik adalah media sosial merupakan salah satu alasan perceraian dalam berkas perkara Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga kemajuan media sosial saat ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi dengan suami istri maupun dengan lawan jenis yang bukan mahram, akan tetapi kalau tidak bijaksana dalam menggunakannya, maka bisa berujung dengan kehancuran rumah tangga. Karena itu, pokok masalah pada penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap putusan hakim yang bercerai akibat penyalahgunaan media sosial.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat bahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini, Hakim mengabulkan gugatan Permohonan dengan *thalaq* satu *raj'i*, dengan pertimbangan meminimalisir kemudharatan berupa pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat penyalahgunaan media sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU

## ملخص

محمد ياري مار (2020): تحليل القانون الإسلامي لقرار قضاة محكمة دينية فصل 1 أ بكنبارو  
عن حالة الطلاق بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير سلب كبير في طلاق الأسرة في خلفية هذا البحث هي تقدم محكمة دينية بكنبارو. في الواقع، تحدث كثير من حالات الطلاق في محكمة دينية بكنبارو بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. والظاهرة المثيرة هي أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد أسباب حدوث الطلاق في ملف قضية محكمة دينية بكنبارو. وهذا يؤدي إلى استنتاج أن تقدم وسائل التواصل الاجتماعي الآن يسهل التواصل مع الزوج والزوجة ومع أفراد من الجنس الآخر الذين ليسوا محارما ولكن الاجتماعي إذا لم يكن من المحكمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار في الأسرة. يهدف هذا البحث لمعرفة قرار قضاة محكمة دينية بكنبارو عن قضايا الطلاق التي حدثت بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولمعرفة شكل اعتبارات القضاة في قرار قضايا الطلاق بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولمعرفة تحليل القانون الإسلامي في قرار قضاة محكمة الدينية بكنبارو. نوع هذا البحث هو بحث مكتبي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البحث المكتبي من خلال جمع المصادر الأساسية والثانوية إما مواد التراثية وغيرها من المواد المتعلقة بموضوع البحث. نتيجة هذا البحث هي أن واقع الأسرة في المجتمع هو الكثير من الإدمان والتواصل المجاني بين الزوج والزوجة وأطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب في نهاية المطاف المزيد من المدونين من الفوائد: أ) سيكون الزوج والزوجة مشغولين مع فيسبوك وإنستغرام وواتسبب وإيمو ومسنجر ولين وبلات بيري مسنجر وجوجل وتويتر وفليكر ويوتوب وغير ذلك. ب) ستجعل مواقع التواصل الاجتماعي الزوج والزوجة والأطفال أكثر أُنانية. ج) سيكون الزوج والزوجة كسالى لتعلم التواصل في العالم الحقيقي، لذا الممتع التواصل مع الآخرين أكثر من زوجته وأطفاله. د) من الأسهل إقامة الزيف لدى الزوج أو الزوجة مع أشخاص آخرين بسبب تكرار محادثة عبر الإنترنت مع الجنس الآخر الذي ليس مهتما مما يؤدي في النهاية إلى اجتماعات في الفنادق والمقاهي وأماكن مزدحمة أخرى

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Muhammad Yari Mar (2020) : This thesis is entitled: The Islamic Law Analysis of Pekanbaru Religious Court Judge's Decision of Class 1 A on the Cases of Divorce Due to Social Media.**

This study was carried out because of the big negative influence of social media progress on family divorce in Pekanbaru Religious Court. The reality showed that many cases of divorce occurred in the court due to social media, it can be concluded that the progress of social media nowadays makes husband or wife or even other members of the opposite sex very easy to communicate with each other, if they are not wise to use social media, it can bring them to the destruction of household. The objectives of this study are to find out the decision of Pekanbaru Religious Court judge regarding the divorce cases caused by the use of social media, to find out the form of judge's consideration in deciding divorce cases due to the use of social media, and to find out the analysis of Islamic law on Pekanbaru Religious Court judge's decision.

This study employed a library research. The data in this study were collected from primary and secondary sources, both library sources and other related sources. The results of the study showed that social media causes an addiction and a lack of communication among husband, wife, and children in the most of society's household, which ultimately gives more harm than benefits: a) Wife or husband is busy with facebook, instagram, whatsapp, imo , massengger, line, BBM, google, twitter, flickr, youtube and others. b). Social networking sites make husband, wife, and children more selfish. c). Husband or wife becomes lazy to communicate in the real world since he/she feels more comfortable to communicate with others on social media.d). It leads husband or wife to doing affair easily with others because of the frequency of chat and finally goes to meetings in hotels, cafes, and other crowded places.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak". dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S. an-Nisa':1).<sup>1</sup>

Selanjutnya perkawinan merupakan proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terj. Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar Rum: 21)”<sup>2</sup>

Perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”<sup>3</sup> artinya untuk mendapatkan kebahagiaan hendaknya Agama dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluria atau kebutuhan biologis manusia dan mengandung makna serta nilai ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan juga merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang hanya menghalalkan

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 406.

<sup>3</sup> Undang- Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2000), Cet. Ke-4.

hlm. 2.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan *mitsaqon gholizon* (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Allah SWT, masih akan disatukan dan hidup bersama kelak di hari kemudian<sup>5</sup>.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah*<sup>7</sup>, *wawaddah*,<sup>8</sup> dan *warahmah*<sup>9</sup>. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga menghadapi kehancuran dan kemudhoratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian ketika talak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka itu merupakan bentuk kufur, hukum kufur nikmat adalah haram.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet.ke-5. Vol. 2, hlm. 387.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq. *Loc.Cit*.

<sup>7</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 201.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra , *Almujtama' al-insani fii zill al-Islam*, (Bayrut: Dar al-Fikr), Jurnal Fiqh, No.8. hlm. 25-44.

<sup>9</sup> Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, Agustus 2007), hlm.

<sup>10</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Dar al-Fikr, t.th), jilid 3, hlm. 526.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat al-Quran yang mengatur *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi, jika ingin melakukan *thalaq* seharusnya waktu istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا لَعْدَةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterim, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”<sup>11</sup>(Q.S at-Thalaq : 1).

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *thalaq* yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun *thalaq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi SAW. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*.<sup>12</sup> Menjatuhkan *thalaq* tanpa ada alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan di sahkan oleh Hakim, sabda Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

<sup>11</sup> Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri, tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228-234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

<sup>12</sup> Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. ke-2, hlm. 98.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhubahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihiwa Sallambersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.<sup>13</sup>

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan yang halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa ada alasan yang membenarkan untuk menjatuhkan *thalaq*. Maka menjatuhkan *thalaq* itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan *thalaq* selagi ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatannya.<sup>14</sup>

Di Indonesia, selain suami yang bisa menggunakan hak *thalaq* untuk berpisah dari istrinya, banyak pula istri yang telah menggunakan haknya untuk mendapatkan cerai dari suaminya melalui lembaga ta’lik *thalaq* di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama Pekanbaru, merupakan tempat dilakukannya penelitian ini, adalah salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara perceraian, termasuk juga cerai gugat yang menduduki posisi tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai instansi

<sup>13</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209 H-273 M), hlm. 219.

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 22-213

<sup>15</sup> Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0*, (Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019), Cet. II, hlm. 4-127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang menangani perkara bagi rakyat yang mencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum kota Pekanbaru, banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Hal ini di buktikan dengan melihat dari berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>16</sup>

Pada tahun 2019, jumlah kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sejumlah 1.873 yang terdiri dari jumlah kasus perkara yang putus sebanyak 1.751 dan sisa kasus tahun 2018 adalah sebanyak 280 kasus perkara. Jika merujuk pada statistik angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, selama tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menangani perkara yang masuk sebanyak 1.752 kasus perkara perceraian, sebanyak 1.331 merupakan cerai gugat, 421 diantaranya merupakan cerai *thalaq* dan sisanya 280 merupakan sisa kasus perkara perceraian pada tahun 2018.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru salah satu penyebab perceraian yang terjadi di sebabkan oleh media sosial, selain itu gugatan tersebut di dominasi gugatan cerai gugat dari istri. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga dan adanya pihak ketiga. Namum hal ini tidak tertutup mungkin ini terjadi karena himpitan tidak adanya perhatian suami maupun istri sehingga hilangnya cinta suami terhadap istri begitupun sebaliknya istri terhadap suami. Oleh sebab itu

<sup>16</sup> Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*. (Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra. 2011), hlm.

<sup>17</sup> Laporan tahunan tentang kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru, (Keadaan Perkara tahun 2019), hlm 7-8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis memfokuskan pada kasus cerai gugat maupun cerai talak yang diakibatkan oleh media sosial.<sup>18</sup>

Sebagai contoh, putusan berkas perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0037/ Pdt.G/2019/PA.Pbr. *Termohon Punya pria idamana lain( selingkuh) bahkan Pemohon pernah melihat termohon chatting di hp termohon.*<sup>19</sup>

Putusan yang lain, berkas perkara nomor 182/ Pdt.G/2019/PA.Pbr. *Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat dan hal tersebut Penggugat ketahui melalui Handphone milik Tergugat.*<sup>20</sup>

Adanya kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan cepat dan jelas dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, kemudahan dalam menerima berita tentang peristiwa yang terjadi dibelahan negara lain. Dalam perkembangan sosial media yang begitu canggih membuat suami dan istri begitu mudah untuk berkomunikasi, sehingganya perkenalan suami atau istri dengan lawan jenis yang terjadi melalui media sosial yang berlanjut pertemuan sehingga terjalinnya hubungan khusus antara keduanya kemudian berujung dengan perselingkuhan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat sampai berujung kepada perceraian.<sup>21</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan dari beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, selalu berujungkan dengan

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, ( Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009 ), hlm. 13.

<sup>19</sup> Lihat berkas perkara nomor 0037/Pdt.G/2019/PA.Pbr. *Dokumen PA tahun 2019*, hlm 3.

<sup>20</sup> Lihat berkas perkara nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Pbr. *Dokumen PA tahun 2019*, hlm 2.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, meski telah dilakukan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun mediasi yang dilakukan jarang berhasil.<sup>22</sup>

Berdasarkan catatan pengajuan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1974 pasal 14 sampai 36. Tentang perkawinan membarikan kedudukan yang sama bagi suami istri, masing-masing memberikan hak untuk mengajukan perceraian.<sup>23</sup>

Persoalan ini sangat menarik jika dikaji lebih mendalam, karena melihat dari fenomena dan fakta-fakta yang terjadi tersebut, penulis merasa pentingnya penelitian ini dilanjutkan baik secara teoritis maupun secara praktisnya dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa penyebab terjadinya perceraian dalam bentuk tesis yang berjudul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL .**

#### B. Penegasan Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulisan memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul :

##### 1. Analisis

Analisis bermakna “penyelidikan terhadap suatu peristiwa” untuk mengetahui keadaan sebenarnya, penyebab, kedudukan perkaranya, atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baik dugaan dan kebenaran.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara yang diterima, Jl. Parit Indah, Tanggal 23 September 2019 Jam 02:45 Wib.

<sup>23</sup> Rofyal Marniani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2005), Cet. ke-1, hlm. 7

<sup>24</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/analisis>, terakhir diakses 09 juli 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama juga tidak ditemukan makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, ia juga berarti yang sebenarnya adalah jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukkan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Kajian wacana hukum di kalangan ahli hukum barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.<sup>25</sup>

Tidak ditemukan fakta siapakah yang lebih dulu memakai istilah hukum Islam, yang jelas para ahli menisbatkan hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *syariat* atau *hukm al-syar'iy*. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata hukum dengan, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, Undang-Undang, peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan kaidah, ketentuan mengenai peristiwa tertentu dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (di Pengadilan) atau vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma

<sup>25</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 24



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>26</sup> Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.<sup>27</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian bermakna; perpisahan, perihal bercerai (atau suami istri) atau perpecahan.<sup>28</sup>

### 4. Media Sosial

Media artinya: alat atau alat saran komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, handphone, poster dan spanduk, dan sosial kata ini bermakna berkenaan dengan masyarakat.<sup>29</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana kasus perceraian cerai *thalaq* yang disebabkan penyalahgunaan media sosial jika ditinjau dari hukum Islam?

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 38

<sup>27</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif 2007), hlm. 286

<sup>28</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/analisis>, terakhir diakses 10 juli 2020

<sup>29</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/analisis>, terakhir diakses 11 juli 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah alasan suami atau istri yang menyalahgunakan media sosial mengakhiri keutuhan keluarganya di Pengadilan Agama Pekanbaru?
4. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan berkas perkara penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Pekanbaru?
5. Apakah keputusan yang ditetapkan Hakim sudah memenuhi unsur keadilan untuk suami ataupun istri?
6. Bagaimana keputusan hakim dalam putusan perkara perceraian Pengadilan Agama Pekanbaru?
7. Bagaimana kasus perceraian cerai gugat yang disebabkan penyalahgunaan media sosial jika ditinjau dari hukum Islam?

#### D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan media sosial. Pada kasus perceraian tersebut pasangan suami istri dapat dijadikan objek penggunaan media sosial, namun pada penelitian ini akan membahas analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kasus perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial ditinjau oleh hukum Islam

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian cerai gugat dan cerai thalaq yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru?
- c. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kasus perceraian penyalahgunaan media sosial analisis Hukum Islam?

#### **Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan media sosial.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kasus perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum Program studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Mengetahui secara mendalam kemajuan teknologi komunikasi menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Penelitian ini diharapkan memiliki mamafaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan konstribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*al-Ahwal as-Syahkhiyyah*), sedangkan secara praktis dapat dijadikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*).<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan pada bahan-bahan kasus perceraian akibat penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019, teori-teori yang berhubungan dengan hukum keluarga tentang perceraian, media sosial, dan keluarga dalam Islam.

Metode penelitian adalah sistem yang mengatur secara ketat untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metode adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>31</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahkan sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Testisia, 2012), cet. Ke-1, hlm. 78

<sup>31</sup> Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 57.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, hlm. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu tiga puluh berkas perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum serta kitab-kitab Fiqh yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum dan Fiqh serta Ensiklopedia Hukum Islam.<sup>33</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.<sup>34</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>35</sup> Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan teknik :

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

<sup>35</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), Cet. Ke-9, hlm. 167

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.<sup>36</sup>

#### Kajian Relevan

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan tela'ah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan yang sudah dibahas diantaranya:

*Pertama, Heri Yanto "KDRT sebagai alasan terjadinya Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Tesis Universitas Diponegoro Semarang".<sup>37</sup>* Kajian penelitian membahas tentang bagaimana pandangan UU No 1 Tahun 1974 dan KHI melakukan perceraian karena KDRT. Kajian ini adalah penelitian normativ tentang kebolehan melakukan perceraian dengan alasan KDRT, sementara kajian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian

<sup>36</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm.

<sup>37</sup> Heri Yanto "KDRT sebagai alasan terjadinya Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Tesis Universitas Diponegoro Semarang", <http://eprints.undip.ac.id/17587/1/heriyanto.pdf>, diakses 22 Juni 2013.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan berupa fenomena cerai gugat perempuan bekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru.

*Kedua*, Maryati SH. MH Penelitian “*Faktor Penyebab Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi*”.<sup>38</sup> Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka gugatan istri di Pengadilan Agama kota Jambi. Dalam penelitian tersebut hanya mencari penyebab saja. Letak perbedaan dengan penelitian lain adalah penelitian yang menguak perubahan pemikiran perempuan tentang konsep keluarga dengan mencari alasan yang mengitari perubahan pemikiran perempuan untuk mengakhiri pernikahan.

*Ketiga*, Ulin Na'mah disertasi”*Makna Cerai Talak Bagi Istri Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*,”<sup>39</sup> penelitian dilakukan tentang pandangan dan pemaksaan istri terhadap cerai talak yang diterimanya karena alasan suami sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah yang layak ataupun karena tuntutan nafkah istri. Dari segi memfokuskan kajian pada perempuan, maka penelitian ini sepertinya sama dengan fokus penelitian peliti. Namun dari masalah yang teliti berbeda, letak perbedaanya adalah peneliti ini tentang carai gugat dari segi kontroksi memahami keutuhan keluarga dan alasan sosialisasi yang mengitarinya khusus pada perempuan yang bekerja.

Dengan demikian sepanjang penelusuran peneliti belum ada penelitian yang memfokuskan kajian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan

<sup>38</sup> Maryati Penelitian “*Faktor Penyebab Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi*”.[http://repository.unand.ac.id/606/1/maryanti\\_04211070\\_2006.rtf](http://repository.unand.ac.id/606/1/maryanti_04211070_2006.rtf), diakses 12 Mei 2004.

<sup>39</sup> Ulin Na'mah disertasi”*Makna Cerai Talak Bagi Istri Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*,” [http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/Ringkasan-Disertasi\\_ulin-namah.pdf](http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/Ringkasan-Disertasi_ulin-namah.pdf), diakses 22 Mei 2012.

Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial.”

## **I Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi istilah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian relevan dan sistematika penulisan.

**BAB II** Ketentuan perceraian dan media sosial hukum Islam yang mencakup: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian, hikmah perceraian, alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengertian media sosial mencakup definisi media sosial, sejarah media sosial dan perkembangannya, kegunaan media sosial dalam keluarga, dasar hukum menggunakan media sosial menurut hukum Islam. Keluarga dalam Islam mencakup pengertian keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, fungsi keluarga dalam sosiologi, keharmonisan dalam berkeluarga.

**BAB III** Putusan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia mencakup putusan Hakim, dasar hukum putusan Hakim, gambaran umum wilayah penelitian, tata tertip Pengadilan Agama, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, tinjauan tentang pos bantuan hukum.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV** Hasil penelitian yang mencakup tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh media sosial, dan analisa hukum Islam terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru akibat media sosial.

**BAB V** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

#### A Putusan Hakim Pengadilan

##### 1. Putusan Hakim

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hanya 3 macam, yaitu: (1) Putusan (Vonnis) (2) Penetapan (Beschikking) dan (3S) Akta Perdamaian (Acta van Dading).<sup>40</sup>

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan.<sup>41</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>42</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural

<sup>40</sup> Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri*, (Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 157-160.

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.159.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.174

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>43</sup>

Menurut Ahmad Mujahidin, Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>44</sup> Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural persidangan, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Pada tahun 2017, jumlah kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sejumlah 1.873 yang terdiri dari jumlah kasus perkara yang putus sebanyak 1.751 dan sisa kasus tahun 2016 adalah sebanyak 280 kasus perkara. Jika merujuk pada statistik angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, selama tahun 2017 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menangani perkara yang masuk sebanyak 1.752 kasus perkara perceraian, sebanyak 1.331 merupakan cerai

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 149.

<sup>44</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 337.

<sup>45</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugat, 421 diantaranya merupakan cerai *thalaq* dan sisanya 280 merupakan sisa kasus perkara perceraian pada tahun 2016.<sup>46</sup>

Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan putusan hakim 30 perkara perceraian akibat penyalahgunaan media sosial di kumpulkan di liat kesamaanya, pilah, simpulkan dan kesimpulanya umum tapi kesimpulanya itu di tarik dari yang khusus. Setelah di kelafikasikan, ada sekitar 19 putusan perkara cerai gugat dan 11 putusan perkara cerai talak tahun 2017.<sup>47</sup>

NO	Cerai Gugat	Cerai Thalaq
1	Nomor Perkara 0137	Nomor Perkara 0190
2	Nomor Perkara 0187	Nomor Perkara 0199
3	Nomor Perkara 0243	Nomor Perkara 0246
4	Nomor Perkara 0268	Nomor Perkara 0321
5	Nomor Perkara 0312	Nomor Perkara 0661
6	Nomor Perkara 0798	Nomor Perkara 0979
7	Nomor Perkara 1073	Nomor Perkara 1043
8	Nomor Perkara 1084	Nomor Perkara 1365
9	Nomor Perkara 186	Nomor Perkara 1402
10	Nomor Perkara 1150	Nomor Perkara 1421
11	Nomor Perkara 1221	Nomor Perkara 0037

<sup>46</sup> Laporan tahunan tentang kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru, (Keadaan Perkara tahun 2019), hlm 7-8.

<sup>47</sup> Laporan tahunan tentang kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru, (Keadaan Perkara tahun 2019), hlm 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Nomor Perkara 1321	
13	Nomor Perkara 1370	
14	Nomor Perkara 1478	
15	Nomor Perkara 1517	
16	Nomor Perkara 1635	
17	Nomor Perkara 1750	
18	Nomor Perkara 182	
19	Nomor Perkara 1042	

Berdasarkan rata-rata putusnya perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru diakibatkan penyalahgunaan media sosial berupa handphone yang bermula hampair dari 30 perkara berawal dari perselingkuhan, egois, temperamen, cemburu, kekerasan, narkoba, tidak menjalankan kewajiban, meninggalkan anak istri, pemabuk dan berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Maka dari sinilah Hakim mengambil dasar hukum putusnyan hakim.

## 2. Dasar Hukum Putusan Hakim

### a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Pada prinsipnya putusan Hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati Putusan pertama dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sifat mengikat dari putusan pertama bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

#### b. Kekuatan Pembuktian

Putusan harus dibuat secara tertulis, tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan Pertamatu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Karena, putusan Hakim itu membentuk secara konkret maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antar pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.<sup>49</sup>

#### c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.309.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.310.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka Putusan Pertama dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.

### B Peradilan Islam di Indonesia

#### 1. Peradilan Agama Masa Kerajaan Islam

Mataram merupakan satu dari beberapa kerajaan Islam di Jawa selain Demak, Pajang, Banten dan Cirebon. Raja pertamanya adalah sutowijoyo yang telah berhasil meruntuhkan Pajang, dan bergelar Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo (Halim, 2000:36).<sup>50</sup>

Perkembangan peradilan agama pada masa kerajaan Mataram dicapai pada masa Sultan Agung. Pada awalnya Sultan Agung masih mempertahankan sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa kerajaan Hindu. Sultan Agung mengambil kebijakan dengan mengisi lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip keislaman (Halim, 2000: 36).<sup>51</sup>

Setelah kondisi masyarakat dirasa siap maka Peradilan Pradata dirubah menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Wewenang Pengadilan Surambi masih tetap seperti Pengadilan Pradata. Hanya saja ketua pengadilan pelaksanaanya di tangan penghulu dan didampingi beberapa ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelas, meskipun pada prinsipnya masih di tangan Sultan. Keputusan

<sup>50</sup> *Ibid*, Catatan, hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi. Selanjutnya lihat, Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm.83.

<sup>51</sup> Mukri Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, Cetakan. IV, (Yogyakarta,ustaka Pelajar, 2004), hlm. 252.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasehat bagi Sultan dalam mengambil keputusan (Halim,2000: 36)<sup>52</sup>

Di aceh, sitem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri. Peradilan itu mempunyai tingkatan-tingkatan, tingkat pertma dilaksanakan di tingkat Kampung yang di pimpin oleh Keucik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum mukim. Peradilan tingkat kedua yang merupakan peradilan banding adalah Oeloebalang. Jika keputusan Oeloebalang memuaskan dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi bisa dimintakan banding kepada Sultan sebagai pengadilan tertinggi.<sup>53</sup>

Dari sistem peradilan tersebut terlihat bahwa pada zaman kerajaan Aceh sudah terbentuk sebuah sistem peradilan yang memiliki dua kompetensi yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut berupa masalah yang berdasarkan hukum Islam, sedang kompetensi relatif meliputi Kampung di tingkat pertama, Oeloebalang yang membawahi beberapa Kampung, di tingkat kedua, Panglima Sagi di wilayah kecamatan dan terakhir Mahkamah Agung yang membawahi seluruh wilayah yang tunduk dibawah pemerintahan (Halim,2000: 43).<sup>54</sup>

Menurut laporan Joan Frederik yang menjadi Residen di Cirebon tahun 1714-1717, Pengadilan Priangan diatur menurut pengadilan

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.118

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm.130.

<sup>54</sup> Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.129.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mataram. Di tiap-tiap kabupaten terdapat seorang jaksa yang menjalankan peradilan terhadap perkara Padu, sedangkan perkara Pradata dikirim ke Mataram (Tresna, 1957:21). Pada masa itu terdapat 3 bentuk peradilan yang berjalan, yaitu :peradilan agama, peradilan drigama dan peradilan cilaga. Masing-masing peradilan itu memiliki wewenang yang berbeda-beda (Tresna, 1957:35).<sup>55</sup>

Peradilan Agama mempunyai wewenang terhadap perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. Pada awalnya perkara ini merupakan perkara yang harus dikirim ke Mataram. Tetapi karena kekuasaan Mataram sudah merosot maka perkara-perkara tersebut tidak lagi dikirim ke Mataram. Perkara-perkara perkawinan dan waris juga termasuk wewenang peradilan agama (Halim, 2000: 43).<sup>56</sup>

Peradilan drigama mengadili perkara selain perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati serta perkawinan dan waris, yang merupakan kewenangan peradilan Agama. Peradilan drigama bekerja dengan pedoman hukum Jawa kuno dan diselesaikan menurut hukum adat setempat. Sementara peradilan cilega adalah peradilan khusus masalah niaga. Peradilan cilega terkenal juga dengan istilah peradilan wasit (Halim, 2000: 43).<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Pasal 128 HIR/152 RBg dan 149 Rbg. Jika diperlukan, maka dapat diperintahkan supaya Putusan Pertamatu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 877

<sup>56</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Op.Cit*, hlm. 150

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Peradilan Agama Masa Kolonial Pra Kemerdekaan

Tahun 1602 Belanda mendirikan perserikatan dagang untuk Timur Jauh yang dinamakan “ De Vereenig de Oost-Indische Compagnie” (VOC). Dalam akad pendirian yang ditetapkan Staten Generaal (Badan Pemerintahan Tertinggi), VOC diberi hak dan kekuasaan untuk memperkuat dan menyelamatkan perniagaan. Selain itu VOC juga diberi hak untuk mempunyai atau memiliki tanah untuk bertempat tinggal, mendirikan benteng-benteng pertahanan, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja yang berkuasa, mempunyai angkatan perang dan armada, serta mengangkat hakim-hakim untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan dalam wilayah kekuasaannya (Tresna, 1957: 26).<sup>58</sup>

Sebagai badan perniagaan, VOC tidak terlalu memperdulikan kehidupan orang Indonesia. VOC hanya mengutamakan perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. VOC tidak mau memperhatikan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan hanya campur tangan terhadap rakyat Indonesia jika itu menyangkut kepentingannya dan kepentingan pegawainya (Salman, 1998: 9).<sup>59</sup>

Pada awalnya hukum yang diterapkan di daerah kekuasaan VOC adalah hukum Belanda, baik hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dan Belanda, semuanya termasuk ke dalam badan-badan peradilan Belanda, yaitu Raad

<sup>58</sup> Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat (1) Rbg)

<sup>59</sup> Makamah Agung, 25 Oktober 1969, No. 391 K/Sip/1969, J.I. Pen. I/70, hlm. 49.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

van Justitiedan Schepenbank. Dengan demikian maka pengadilan asli yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat menjadi tidak ada (Salman, 1998: 9).<sup>60</sup>

Pada awalnya hukum yang diterapkan di daerah kekuasaan VOC adalah hukum Belanda, baik hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dan Belanda, semuanya termasuk ke dalam badan-badan peradilan Belanda, yaitu Raad van Justitiedan Schepenbank. Dengan demikian maka pengadilan asli yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat menjadi tidak ada (Salman, 1998: 9).<sup>61</sup>

Dalam kenyataannya peradilan VOC hanya efektif di daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, sementara untuk daerah lainnya sukar untuk dilaksanakan. Akhirnya VOC membiarkan hukum-hukum setempat berjalan sebagaimana sebelumnya. Bahkan dalam Statuten van Batavia (statuta batavia) 1642 yang merupakan kodifikasi peraturan perdata dan pidana dinyatakan : Bagaimanapun juga bahwa yang akan diperhatikan dan diturutkan yaitu berlakunya hukum Barat dalam hal perkara pewarisan orang Kristen, orang Tionghoa dan orang yang beragama kuno serta orang Islam (jadi kebanyakan orang Indonesia) tinggal tetap..... pada mereka kebiasaan serta adat tentang hak itu, yang terpakai pada mereka (Salman, 1998 : 10).<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 84.

<sup>61</sup> Bentuk Putusan Pertamani diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv

<sup>62</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama dan bersifat kecil, maka diadakan “Gecommitteerde tot en Over de Zaken van den Inlander”. Melalui resolusi 7 November 1754 GG Mossel memberikan perintah terhadap opsir-opsir dan kepala-kepala adat supaya mereka menuliskan hukum sipil serta adat yang berlaku untuk mereka dan menyerahkannya pada Gecommitteerde Freijer kemudian menyusun buku hukum yang terkenal dengan sebutan Compendium Freijer, yang berisi hukum perkawinan dan waris Islam, dan disahkan tahun 1760 (Salman, 1998 : 10).<sup>63</sup>

Papakem Cirebon juga berisi mengenai pengadilan 7 jaksa yang diberi nama Pengadilan Karta dan Pengadilan Penghulu. Pengadilan Penghulu memiliki kompetensi sebagai berikut (Tresna, 1957 : 32) :

- a. Kejahatan yang disebut dalam kitab hukum Raja Niscaya, yang merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati seperti membakar dan meracun orang. Hukum acara dilaksanakan menurut peraturan-peraturan Jawa kuno, tetapi sumpah dilakukan secara Islami.

- b. Perbuatan terlarang yang dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman siksaan badan.

- c. Perkara-perkara yang dilakukan orang-orang dari golongan tertentu:

<sup>63</sup> Pasal 128 HIR/152 RBg dan 149 Rbg. Jika diperlukan, maka dapat diperintahkan supaya Putusan Pertamatu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang dalam keadaan apapun harus selalu diadili oleh Pengadilan Penghulu, yaitu yang memiliki derajat Sajid, Sarif, alim ulama dan pemuka-pemuka Islam.

2. Yang hanya menggunakan forum privilegium (hak istimewa) jika mereka melaksanakan perbuatan salah tidak bersama-sama dengan orang yang segolongan.

Dengan menekankan pada susunannya maka Pengadilan Penghulu dapat disebut sebagai Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

#### C. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Peradilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Peradilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Peradilan Agama yang ada di Indonesia.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.<sup>65</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen

<sup>64</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, h. 105.

<sup>65</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Badan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan mengadili dan memutuskan perkara untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk menengahi konflik hukum yang dipetik dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>66</sup>

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga peradilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum Belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Peradilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Peradilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1982, pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama dikalangan umat Islam, di antaranya:

- a. Pada bulan September 1908, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi: "Terhadap urusan-urusan agama

<sup>66</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding”.

- b. Pada tahun 1820, melalui Statblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain sebagainya. Dan istilah “Bupati” dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.<sup>67</sup>
- c. Pada tahun 1823 dengan Revolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pengeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Peradilan Agama bagi umat Islam, meskipun di masa Penjajahan Belanda, namun lembaga Peradilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di

---

<sup>67</sup>Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, hlm. 43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar Jawa dan Madura dicantum dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.<sup>68</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.<sup>69</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendekiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut Pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara

<sup>68</sup>Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1989), hlm. 1-2.

<sup>69</sup>Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), hlm. 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.<sup>70</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.

Di tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara seperti perkara waris-mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957:

<sup>70</sup>SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), hlm. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku.<sup>71</sup>

Namun masalah waris merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, hlm.

<sup>72</sup>Abbas Hasan, *Op. cit.* Hlm. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang bertempat di jalan Rambutan Nomor 20 Pekanbaru, kemudian melantik pula Abbas Hasan sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 1959.<sup>73</sup>

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970. Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>74</sup>

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Hlm. 11

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, SH (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, SH, MH (1998-2001), Drs. Zein Hasan (2001-2002), Drs. H. Harun S, SH (2002-2006), Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH (2006-2010), Drs. H. Firdaus, HM, SH, MH (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2013-2015), dan Drs. H. Syaifuddin, SH, M.Hum (2017-sekarang).

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun
1	Jalan Rambutan No. 20	(1958-1966)
2	Jalan Riau Lama	(1966-1971)
3	Jalan Samratulangi	(1971-1973)
4	Jalan Singa	(1973-1976)
5	Jalan Kartini	(1976-1985)
6	Jalan Pelanduk No. 21	(1985-2007)
7	Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01	(2007-2015)
8	Jalan Parit Indah	(2015-2017-sekarang)

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 21 Pekanbaru, dan pada bulan Februari 2015 berpindah lagi di Jalan Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di kompleks Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2004 tentang Pangalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung". Oleh karena itu, semua badan peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.

## 2. Tata Tertib Pengadilan Agama

Sebaiknya Pengadilan Agama bertempat di kota pemerintahan, dan Hakim dalam mengadili di tempat yang bisa terlihat oleh pengunjung. Diantara tata tertib Pengadilan dan Hakim adalah:

- a. Bertempat tinggal di kota (tempat) pemerintahan, sebab lebih cepat bisa bertindak dan mendekati keadilan.
- b. Dalam mengadili, Hakim duduk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa, penggugat, dan pengunjung, sehingga menghilangkan syakwasangka.
- c. Sebaiknya, tidak memutuskan perkara di masjid. Sebab di masjid tidak bisa bebas; seperti tidak bisa bersuara keras, tidak semua perempuan bisa masuk, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Disamping hal tersebut di atas, Hakim wajib mempersamakan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam menghukum kepada

<sup>75</sup>Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3, hlm. 377.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya adab Hakim adalah melaksanakan tata tertib Pengadilan, memperlakukan orang-orang dengan berperilaku sama dalam tempat duduk, kata-kata, dan perhatian. Tempat duduk artinya, masing-masing diberi tempat duduk yang sama, bebas, bisa melihat Hakim dan tidak merasa tertekan. Kata-kata artinya, masing-masing diberikan kebebasan argumentasinya, dan mengemukakan pendapatnya. Masing-masing harus mendapatkan perhatian yang sama artinya alasan-alasannya diperhatikan, dan pandangan Hakim ke arah yang sama. Selanjutnya Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang berperkara.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru.

Moto Pengadilan Agama Pekanbaru ialah prima dalam pelayanan konsisten dengan aturan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (Panmud), yaitu Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum. Beberapa orang Panitera Pengganti, Jurusita dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang saat ini masih dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum.

Adapun susunan/struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1. Ketua         | : Drs. H. Usman, SH, M.H |
| 2. Wakil Ketua   | : Drs. Ahmad Sayuti, MH  |
| 3. Majelis Hakim | :                        |

<sup>76</sup>Statistik/Struktur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Hakim
1	Dra. Hj. Erlis, SH. MH
2	Dra. Ilfa Susianti, SH.MH
3	Drs. Ali Amran, SH
4	Dra. Nurhaida, Mg
5	Drs. H. Ahmad Anshary M, SH. HM.
6	Drs. H. Syarifuddin, SH. MH
7	Dr. Hj. Nursyamsiah, SH.MH
8	Drs. Asfawi, MH
9	Drs. H. Januar
10	Drs. Miranda
11	Drs. H. Sasmiruddin, MH
12	Dra. HJ. Nurlen Afriza, MA
13	Drs. Adabul Gani, MH
14	Drs. H. Affandi, M.H
15	Drs. Abdul Aziz, M.H.I
16	Dra. Hj. Sofinar Muktar, MH
17	Drs. Asy'ari, MH
18	Dra. Sayuti, M.H

4. Penitera : Muhammad Yasir Nasution, M.A
5. Sekretaris : Samsir Toona, S.H.I
6. Panmud Permohonan : Hj. Umi Salma, SH
7. Panmud Gugatan : Zahniar, SH
8. Panmud Hukum : Fakhriadi, SH.MH
9. Kasubag Umum/Keuangan : Sutikno Hadi, SH
10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Anita Febrina, SE
11. Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan : Hj. Ernita, SH
12. Panitia Pengganti :

No	Nama
1	Hj. Marsyidah, SH
2	Akhyar, SH
3	Nur Hakim, SH



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Hj. Zulfahmi, S.Ag. M.H
5	Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H
6	Hj. Hidayati, S.Ag
7	Zuriati, S.Ag
8	Erdanita, S.Ag., M.H.
9	Liza Fajriati H, SH
10	Ana Gustina, SH.M.H
11	Elpitria, SH., M.H

### 13. Juru Sita :

No	Nama
1	Syukri
2	Aguslim
3	Khairul Anuar, SH
4	Sugeng, S.kom
5	Wawan Suwandi, SH

### 14. Jurusita Pengganti :

No	Nama
1	Hidayah
2	Komaria
3	Rini Artati
4	Habibunnazar
5	Almisri

### 15. Staff :

No	Nama
1	Sri Yunidarti, SH
2	Elfitri, S.Hi, MH
3	Zuliani, S.Ag
4	Rina Ramadani, SE, MH
5	Muhammad Fajar Marta, SH
6	Hanggi Haulani Adha, SE
7	Amir Lutfi Zainuddin

### 5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

- a. Tugas Pengadilan Agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ketentuan pasal 49 ayat No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak;
- 8) Shadaqah, dan;
- 9) Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama di atas. Hal ini berarti Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diatur peraturan perundang-undangan.

#### 1. Wewenang Pengadilan Agama

##### a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditingkat pertama, maupun ditingkat Banding.<sup>77</sup> Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui kePengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru, Riau.

#### b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>78</sup>

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;

<sup>77</sup>Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 204

<sup>78</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-1, hlm. 54.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak;
- 8) Shadaqah, dan;
- 9) Ekonomi syari'ah.

Adapun mengenai jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.<sup>79</sup>

**Tabel 4.1**  
**Pengadilan Agama Pekanbaru Rekap Jenis**  
**Perkara Diputus Tahun 2019**

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	7 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	16 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	1 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	16 Perkara
9.	Harta Bersama	25 Perkara
10.	Cerai Gugat	1.331 Perkara
11.	Cerai Talak	421 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	2 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	0 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	31 Perkara
23.	Wali Adhal	5 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara

<sup>79</sup>Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Tahun 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Perkara	Total
26.	Kewarisan	18 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	0 Perkara
32.	Lain-Lain	0 Perkara
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.871Perkara</b>

#### Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon. Bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penerima bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Posbakum adalah pelayanan publik dengan dilihat masih banyak masyarakat yang tidak tersalurkan kehendaknya menurut hukum, tapi tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada uang/biaya (miskin) dan hal ini adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari.

#### a. Latar Belakang Berdirinya Posbakum

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk masyarakat selama ini kesulitan memperjuangkan haknya di Pengadilan Agama. Adapun latar belakang didirikannya Posbakum adalah:

1. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan Prosedural.
2. Banyaknya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.<sup>80</sup>

#### b. Dasar Hukum Posbakum

Berdasarkan latar belakang didirikannya Posbakum di atas, dapat dipahami bahwa pendirian Posbakum adalah suatu langkah yang sangat baik. Tetapi, hal itu juga harus dilengkapi dengan dasar hukum supaya setiap aktivitas Posbakum diakui oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum Posbakum adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI (Peraturan Mahkamah Agung Republik

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yusar (Wakil Ketua) di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 18 April 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

**c. Tujuan Didirikannya Posbakum**

Posbakum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-sebesarnya pencapaian rasa keadilan. Selain itu Posbakum juga bertujuan:

- 1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan.
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
- 4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>81</sup>
- 5) Petugas pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru:
- 6) Muhammad Nefos, SH, selaku Pimpinan.
- 7) Kurniawan Syarif, S.Hi, selaku Tenaga Pembuat Gugatan.<sup>82</sup>

#### d. Perkara-Perkara yang Dibantu Posbakum

Posbakum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama pekanbaru dalam rangka membantu penyelesaian perkara. Semua perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum Posbakum sebanyak 27 macam dan 22 macam di antaranya termasuk bidang perkawinan.

Dari 27 perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sudah ditangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 adalah:

- 1) Gugatan (Cerai Talak berjumlah 346 perkara, Cerai Gugat berjumlah 1004 perkara);
- 2) Harta Bersama berjumlah 13 perkara;
- 3) Hak Asuh Anak berjumlah 8 perkara;
- 4) Penetapan Ahli Waris berjumlah 20 perkara;
- 5) Mal Waris berjumlah 2 perkara;

<sup>81</sup> Pasal 2 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

<sup>82</sup> Struktur Posbakum Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Itsbat Nikah berjumlah 19 perkara;
- 7) Pengangkatan Anak berjumlah 1 perkara;
- 8) Dispensasi Nikah berjumlah 10 perkara;
- 9) Izin Poligami berjumlah 2 perkara;
- 10) Perubahan Buku Nikah berjumlah 7 perkara;
- 11) Wali Adhal berjumlah 3 perkara;
- 12) Perwalian berjumlah 6 perkara;
- 13) Eksekusi berjumlah 1.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Kurniawan Syarif, (selaku Petugas Posbakum), Wawancara, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 5 November 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KETENTUAN PERCERAIAN DAN MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM

#### A Perceraian dalam Islam

##### 1. Defenisi Perceraian

Kata talak berasal dari bahasa arab المطله yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.<sup>84</sup> Sedangkan menurut istilah syara', talak ialah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>85</sup>

Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan talak ialah:

حِلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَخَوْدِهِ، أَوْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أَي: بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أَي: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan talak raj'i) dengan lafal yang ditentukan”.<sup>86</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziriy dalam kitab *Al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah* talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan atau mempermudah pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu”.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Ahmad Warson Almunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 862.

<sup>85</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 11.

<sup>86</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar at -Taufiqiyah litturots, t.th), jilid 3, hlm.232.

<sup>87</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 192.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian (Talak) berdasarkan syara' adalah lepasnya tali perkawinan.<sup>88</sup> Talak menurut Imam Syafi'i artinya melepaskan ikatan perkawinan (nikah). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan.<sup>89</sup>

Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.<sup>90</sup> Lebih jelasnya, perceraian dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19 peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, antara lain:

- a. Jika ada salah satu pihak yang berzina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa izin yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Dar al-Fikr, t.th), jilid 3, hlm. 229.

<sup>89</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 117, hlm.261.

<sup>90</sup> Undang- undang Pokok Perkawinan, *Op.Cit*, hlm. 12.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami/istri.<sup>91</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan yang setelahnya hubungan suami istri tidaklah halal lagi. dan ini hanya terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak raj'i.<sup>92</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian (Talak)

### a. Al- Qur'an

#### 1) Surah Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak dua kali adalah talak yang bias dirujuk. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".<sup>93</sup>

#### 2) Surah Al-Baqarah (2): 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan jika suami mentalak istrinya, kemudian habis masa iddah istrinya, maka walinya dilarang untuk menghalanginya untuk menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

<sup>91</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18.

<sup>92</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm.192.

<sup>93</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Surah At-thalaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: “Hai para nabi, apabila ingin menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menjalankan iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”<sup>94</sup>

#### b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihiwasallam bersabda: "Talaq adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

#### c. Ijma' dan Akal

Menurut Ibnu Qudamah, para ulama sepakat tentang bolehnya talak, dan 'ibrah (pertimbangan akal) juga membolehkannya. Hal ini berdasarkan terkadang hubungan di antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan dapat menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, akan tetapi suami tetap memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 559

<sup>95</sup> Ali Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiah , t.th), jilid.3. hlm. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat dan Rukun Perceraian (*Thalaq*)

Dalam hal ibadah ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, adapun syarat dan rukun talak:

#### a. Rukun *Thalaq*

Rukun *thalaq* ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan harus terwujud, terwujudnya atau tidaknya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut,<sup>96</sup> adapun rukun talak itu sebagai berikut:

- 1) Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, tidak ada orang lain yang berhak menjatuhkan talak kecuali suami.<sup>97</sup>
- 2) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah orang yang akan mendapatkan talak.<sup>98</sup>
- 3) Sighat talak, sighat talak lafal talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih atau jelas maupun kinayah atau sindiran, baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan memberikan kuasa kepada orang lain.<sup>99</sup> Artinya dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Adapun niat yang dimaksud adalah

<sup>96</sup> *Op.Cit*, hlm. 201.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm.201

<sup>98</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Hoffer E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.ke-1, hlm. 467.

<sup>99</sup> Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4, hlm. 438.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melafalkan talak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.<sup>100</sup>

#### b. Syarat Talak

Syarat bagi orang yang akan menjatuhkan talak antara lain sebagai berikut ini:

- 1) *Baligh*, talak yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah meskipun ia memiliki kecakapan dan kepandaian, hal ini para ulama mazhab sepakat kecuali Hambali. Ulama mazdhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.<sup>101</sup>
- 2) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah jika ia menjatuhkan talak kepada istrinya, yang dimaksud gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau hilang ingatan karena rusak syaraf otaknya.<sup>102</sup>
- 3) Atas kehendak sendiri, yaitu talak yang disebutkan oleh suami atau keinginan sendiri dan tidak boleh ada tekanan dari pihak lain. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak

<sup>100</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 204.

<sup>101</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Cet. ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), hlm. 441.

<sup>102</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Op.Cit*, hlm. 202.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa.<sup>103</sup>

- 4) Betul berniat ingin menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu Zahrah, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, halaman 283 mengatakan bahwa, dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akal.<sup>104</sup>

#### c. Macam-macam Perceraian ( Talak )

Adapun macam-macam talak, antara lain<sup>105</sup>

- 1) Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak oleh suami, talak itu ada dua:
  - a) Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan suami belum menyentuhnya kembali di masa bersihnya itu.<sup>106</sup>
  - b) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.<sup>107</sup>
- 2) Dilihat dari bolehnya si suami kembali ke pada mantan istri, talak itu terbagi dua:

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Cet. ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), hlm. 442.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 442

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Garis garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

<sup>106</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 237.

<sup>107</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Op.Cit.*, hlm. 194.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Talak raj'i, adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak ini terjadi pada talak satu atau talak ke dua.<sup>108</sup>
  - b) Talak bain, adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi suami terhadap bekas istrinya, jika suami ingin rujuk kembali kepada bekas istri, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>109</sup>
- 3) Ditinjau dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatukan talak, maka talak tersebut dibagi menjadi dua macam:
- a) Talak sharih, adalah talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.
  - b) Talak kinayah, adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, contohnya "saya sekarang ingin sendirian dan hidup membujang".<sup>110</sup>

#### 4. Hikmah Perceraian (Talak)

Pada dasarnya, tujuan kehidupan berumah tangga harus ialah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing dan saling melengkapi kekurangan. Di samping itu harus juga membentuk keseragaman, keeratan,

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 194-195.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembutan dan saling pengertian dalam anggota keluarga tersebut sehingga timbul suasana rumah tangga menjadi yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.<sup>111</sup>

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga ada salah satu pihak atau keduanya (suami atau istri) tidak lagi merasakan cinta kasih, kemudian keduanya sudah tidak saling peduli satu dengan yang lainnya dan tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran yang berkepanjangan. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perdamaian, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir

<sup>111</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 205.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami.<sup>112</sup> Pada saat itu, talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau menginstropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.<sup>113</sup>

## B. Putusnya Perkawinan dalam Islam

### 1. Defenisi Khulu'

Khulu'menurut etimologi berasal dari kata“Al-Khul'u” yang berarti menanggalkan pakaian, melepaskan pakaian.<sup>114</sup> karena suami istriibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalamayat Al-Qur'an. Sedangkan menurut terminolog fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>115</sup> Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.<sup>116</sup>

<sup>112</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 206

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm.206.

<sup>114</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hlm 361

<sup>115</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm.353-354

<sup>116</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995), hlm. 498

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu'menurut. Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar' iwaddari pihak istri, baik dengan ucapan khulu'maupun talak.<sup>117</sup> Sedangkan menurut KHI khulu' ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>118</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu'itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Haris, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya "Aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (khulu') dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya"<sup>119</sup>

Menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab berpendapat : Asalkhulu'dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya khulu'ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagilaki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah ta'ala berfirman :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

<sup>117</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hida karya, Cet.10,1983),hlm. 131

<sup>118</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Op.Cit...*,hlm. 357

<sup>119</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, *Op.Cit...*,hlm. 134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka" <sup>120</sup>*

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, <sup>121</sup>tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh Allah. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak beda antara bolehnya khulu' dengan mengembalikan semua maharnya/sebagiannya, atau dengan katalainnya, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya/lebih, tidak beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu' berdasarkan keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 229 ;

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*Artinya : "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"*

<sup>120</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 37

<sup>121</sup> *Ibid*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Defenisi Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan<sup>122</sup> atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan<sup>123</sup> atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri.<sup>124</sup> Mana kala, menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>125</sup>

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.<sup>126</sup> Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri.<sup>127</sup>

Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah

<sup>122</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 190

<sup>123</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 627.

<sup>126</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : rajawali Press, 2009), hlm. 195-196

<sup>127</sup> Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 1, hlm. 481

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.<sup>128</sup> firman Allah Al-Baqarah ayat 231 :

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya :”Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka”

Berdasarkan Firman Allah, Al Hadits dan kaedah tersebut diatas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.<sup>129</sup>

### 3. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dari penelusuran dari data yang dilakukan maka dapat dipaparkan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut :

#### a. Nafkah

Salah satu yang dijadikan alasan oleh istri ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah nafkah sekitar 50% atau 15 dari 30 berkas perkara. Alasan yang dominan dari istri yang mengajukan perceraian adalah perkara nafkah, secara umum mengatakan suami tidak memberikan nafkah walaupun suami

<sup>128</sup> Al Hamdani, *Op. Cit.*, hlm. 272

<sup>129</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.244

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai penghasilan dan ada juga yang tidak mempunyai penghasilan tetap.<sup>130</sup>

Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin, Nafkah suami terhadap istri dan anak dalam rumah tangga sebenarnya telah menjadi pembahasan fiqh Islam. Dalam hal ini, fiqh menentukan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga. Akibat dibebankannya secara penuh tanggung jawab nafkah keluarga kepada suami, maka Islam menjadikan kepemimpinan rumah tangga berda di tangan suami.<sup>131</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. an-Nisa' 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>132</sup>

Dalam ayat di atas Allah SWT. Menguraikan bahwa dia menciptakan laki-laki dengan memiliki beebrrpa derajat kelebihan dibandingkan perempuan, berupa fitrah fisik dan kewajiban yang menjdaikan dia siap untuk memimpin keluarga. Sebagai

<sup>130</sup> Data olahan 2017, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*

<sup>131</sup> Fitriayah Wardie Murdani, *Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam*, dalam Al-Insan, NO. 3, Vol. 2, Tahun 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insa, 2006), hlm. 19.

<sup>132</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 85



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompensasinya, Allah SWT. Mewajibkan suami untuk menanggung secara penuh tanggung jawab nafkah dalam keluarga.<sup>133</sup>

Lebih dari itu, kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapangan ataupun sempit, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Untuk mendapatkan nafkah ini suami, Ulama sepakat menyatakan ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh istri:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada perintah suami dalam hal kebaikan.
- 3) Istri memenuhi keinginan seksual kepada suami, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.
- 4) Istri tidak menolak permintaan suami ketika diajak berpergian, kecuali jika istri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya.
- 5) Antara suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.<sup>134</sup>

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh suami yang menjadikan istri berhak menerima nafkahnya. Jika istri tidak memenuhi syarat diatas, maka istri tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. Artinya istri yang berkerja tetap mendapatkan nafkah

<sup>133</sup> Fitriayah Wardie Murdani, *Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam*, dalam Al-Inسان, NO. 3, Vol. 2, Tahun 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Islam, 2006), hlm. 20

<sup>134</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif: 1980), hlm.110-111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suami selama mereka dalam ikatan nikah yang sah dan menjalankan kewajiban melayani dan mematuhi suami.<sup>135</sup>

Ulama Fiqh berpendapat bahwa suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang istri bekerja mencari nafkah, apabila suami tidak bisa bekerja mencari nafkah baik karena sakit, miskin atau kerena yang lain. Lebih tegas ulama Mazhab Hambali menjelaskan, seorang laki-laki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai perkerja yang setelah perkawinan juha akan terus bekerja atas alasan apapun. Fiqh membenarkan suami dan istri yang keduanya bekerja di luar rumah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang berarti fiqh tidak memandang bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi istri uantuk bekerja di luar rumah juga untuk mencari nafkah.<sup>136</sup>

#### b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan alasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai responden adalah 26% atau 8 dari 30 berkas perkara. Kekerasan dalam rumah tangga yang di maksud adalah kekerasan fisik dan psikhis dalam rumah tangga, baik yang berbentuk fisik marusak jasmana baik yang berbentu kata-kata kasar, bentakan, penghinaan, dan kata-kata

<sup>135</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz VII, hlm. 573.

<sup>136</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, hlm.795

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kotor, berfoya-foya dengan wanita lain dan mengabaikan anak-anaknya.<sup>137</sup>

Kekerasan psikis yang dialami oleh responden berupa kata-kata kasar, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, mengambil keputusan sendiri, mengabaikan pasangan dengan pergi berfoya-foya dan suka keluar malam tanpa memperhatikan istri dan anak-anak. Bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh responden adalah berupa tamparan, memukul, menedang, mencekik, menuang air kopi panas, mengorok dengan parang, melempar barang. Dalam realitanya responden yang mengalami kekerasan fisik secara tidak langsung juga mengalami.<sup>138</sup>

Hal ini disebabkan adanya pemahaman atau penafsiran Agama yang posisi suami mengontrol istri melalui ayat-ayat yang terkait dengan rumah tangga seperti makna *nuzyuz* dan *qawwam*. Ungakapan kaum laki-laki adalah *qawamun* bagi perempuan sebenarnya bermakna bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik, menjaga, dan membimbing istri agar melaksanakan *amar makruf nahi munkar* dan menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami, dan penjagaan suami tersebut meliputi fisik dan moral.<sup>139</sup>

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri sekaligus menunjukkan bahwa status dan kedudukan istri itu memang berada di bawah suami. Karena itu, berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka

<sup>137</sup> Data olahan 2017, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*

<sup>138</sup> A.hassan, *al-Furqan*, (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1978), Cet.X,

<sup>139</sup> Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an*, Cet. I (TTP: Fa. Sumatra, TT). Hlm



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nuzyuz seharusnya tidak hanya diletakan kepada istri saja, namun juga terhadap suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228, *para suami mempunyai derajat di atas para istri*. Ayat ini mengacu kepada pembagian tugas dalam keluarga, bukan menjelaskan kelebihan yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, penegasan bahwa para suami mempunyai derajat di atas para istri seperti ditugasi menjadi pemimpin rumah tangga (kepala keluarga).<sup>140</sup>

#### c. Meninggal istri

Sebanyak 23% atau 7 dari 30 berkas perkara menyatakan alasan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam tuliskan ini dipaparkan beberapa kondisi yang dialami dari berkas perkara.<sup>141</sup>

Menurut Hukum yang berlaku kewajiban suami adalah memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam rumah tangganya. Perbuatan meninggalkan istri tanpa alasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dapat menjadi alasan bagi istri untuk melakukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dilua kemampuannya.

<sup>140</sup> Muhammad Yunus, *Terjemahan al-Qur'anil-Karim*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hlm.49.

<sup>141</sup> Data olahan 2019, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*, hlm.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah, akan mengakibatkan penelantaran semua kewajiban, kewajiban nafkah, kewajiban perlindungan, kewajiban rasa aman dan lain sebagainya. Pada gilirannya perempuan yang ditinggalkan suaminya tanpa alasan yang sah berarti suaminya sudah membiarkan istri teraniaya dan terzolimi dan tidak punya status yang jelas. Istri yang mengambil sikap untuk keluar dari status yang tidak jelas adalah lebih bijaksana terhadap masa depan dirinya dan anak-anaknya. Sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>142</sup>

Dipahami dari ayat di atas bahwa sikap yang diambil oleh istri adalah untuk keluar dari melanggar hukum-hukum Allah, dalam hal ini suami yang meninggal istri jelas sudah tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan Allah. Mengambil langkah bercerai mengeluarkan suami dari kezalimannya terhadap keluarga.<sup>143</sup>

- d. Media sosial (Handphone, WhatsApp, Facebook, dan Semacamnya)

<sup>142</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 37

<sup>143</sup> Muhammad Yunus, *op.cit.* hlm. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media sosial menjadi alasan di berkas perkara di Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian adalah sebanyak 29% atau 28 orang dari 30 berkas perkara. Tercatat bahwa pihak istri sering menemukan foto-foto mesra, chat/sms menggunakan kata-kata sayang didalam handphone milik suaminya, whatsApp, bahkan vidio berduaan dalam handphone suami dengan perempuan lain, ternyata ini sudah berkali di lakukan suami dan istri menemukan bukti.<sup>144</sup>

Dari paparan data-data yang ada, dapat di lihat bahawa perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya sudah berulang kali dilakukan oleh suaminya yang menemukan sms/chat, foto yang ada dalam handphone suaminya dan sering ketahuan lagi berbalas pesan di “WhatsApp” memanggil wanita tersebut dengan “sayang” dan mengucapkan “I love U”, dan begitu juga dengan suami yang menemukan bukti perselingkuhan istri dengan laki-laki lain menemukan foto-foto mesra dirumah kos laki-laki selingkuhanya dan foto-foto karaoke dengan selingkuhanya, sampai melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan mengirimkan foto tampak busana kepada laki-laki selingkuhanya tersebut dan bahkan ada yang sibuk main game online sehingga tidak memperdulikan anak-anaknya, bahkan sering kali Tergugat mengabaikan anak-anaknya yang sedang nangis karena sibuk main game melalui handphonenya bahkan tidak bisa lepas dari handphonenya.<sup>145</sup>

<sup>144</sup> Data olahan 2019, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*. hlm.1.

<sup>145</sup> Berkas perkara nomor, 0979/Pdt.G/PA.Pbr. *Dokumen PA tahun 2019*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemakaian media sosial untuk semua kalangan manusia hukum asal adalah boleh (Mubah), sejauh dalam pemakaiannya tersebut tidak ada yang ada memudhoratkan kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)." Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menggunakan media sosial adalah tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka media sosial pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika media sosial digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita menggunakannya.

#### e. Pemabuk dan Narkoba

Tergugat pemabuk dan narkoba sebanyak 10% atau 3 dari 30 berkas perkara. Dalam hal ini akan di paparkan data-data yang berkas perkara tentang keadaan rumah tangga mereka. Berdasarkan yang ada bahwa suami pemabuk, narkoba dan penjudi mengakibatkan cekcok dan pertengakaran dan KDRT, bahkan lebih jauh lagi perekonomian keluarga menjadi sulit. Dalam kasus ini perilaku tergugat sulit disembuhkan terbukti dari kenyataan bahwa meskipun sudah masuk penjara namun perilaku jelek tergugat juga tidak berubah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di pahami dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana aturan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya”*.<sup>146</sup>

### Media Sosial

#### 1. Definisi Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media yang dapat diakses melalui online maupun offline, untuk berinteraksi antara satu sama lain yang dilakukan secara online atau offline yang memungkinkan individu untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan menurut para ahli Chris Garrett media sosial merupakan alat, jasa, dan komunikasi yang dengannya terjadi hubungan antara satu orang dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Adapun menurut wikipedia media sosial adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk berbuat, berbagi atau bertukar informasi, ide, dan gambar atau video dalam komunitas dan jaringan virtual.<sup>147</sup>

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa media sosial adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat berkomunikasi sesama *user* (pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini. Dalam hal ini, *user* atau pengguna dapat berbagi informasi berupa kejadian, berbagi foto, dan dapat

<sup>146</sup> Data olahan 2019, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*. hlm.1.

<sup>147</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial), diakses pada tanggal 03 Maret 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga untuk menambah wawasan serta bisa juga sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman secara cepat. Internet merupakan salah satu aspek penting penunjang dalam berhubungan dalam aplikasi sosial media, internet telah mengubah banyak perkembangan di dunia ini dan ia merangkul peran manusia dalam kehidupan manusia. Internet juga memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam sosial media, melalui internet manusia dapat berbagi informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar sesama manusia dengan menggunakan sosial media meskipun berada dalam belahan dunia yang jauh akan tetapi dapat diakses secara cepat. Bahkan banyak manusia yang bergantung pada internet untuk mengoperasikan sosial media. Sosial media telah banyak membuat perusahaan teknologi dan informasi membuat aplikasi sosial media seperti *facebook, twitter, myspace dan friendster*, serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada di era perkembangan modern ini.<sup>148</sup>

## 2. Sejarah Media Sosial dan Perkembangannya

Media sosial mulai dikenal pada tahun 1978, diawali dari penemuan sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah, atau mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. Ward Christensen dan Randy

<sup>148</sup> Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam dari <http://googleweblight.com/?lite?url=http://>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suess adalah dua orang yang pertama kali menemukan papan bulletin yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer.

Perkembangan media sosial pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1971. Tahun 1995 mulai muncul situs GeoCities, situs ini melayani Web Hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja, dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain. Situs ini menawarkan penggunaannya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Sehingga bisa dikatakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah Media sosial. Tahun 2002 Berdirinya Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi sangat terkenal, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Tahun 2003 Berdirinya LinkedIn, tak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah Media Sosial makin berkembang.

Tahun 2003 Berdirinya MySpace, MySpace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga myspace di katakan situs jejaring sosial yang user friendly.<sup>149</sup>

<sup>149</sup> Rini Darmastuti, *Media Relations*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2012), hlm. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2004 Lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. Tahun 2006 Lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter. Tahun 2007 Lahirnya Wiser, situs jejaring social pertama sekali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (22 April) 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok. Tahun 2011 Lahirnya Google, google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama google, namun pada awal peluncuran. google+ hanya sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu google+ di luncurkan secara umum.<sup>150</sup>

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi seperti sekarang karena semua golongan dapat memiliki media sendiri. Adapun media elektronik seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna dapat mengakses berbagai macam berita terhangat menggunakan media sosial dengan jaringan yang mengakses internet lambat meskipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan

---

<sup>150</sup> Ibid, hlm58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik teks, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.<sup>151</sup>

### 3. Kegunaan Media Sosial dalam Keluarga

Dalam buku yang berjudul *Gaya Gaul Anak Muda* dengan Facebook karya Dominikus Juju dan Matamaya Studio, menyatakan bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan bergabung di media sosial, seperti menjalin pertemanan membuat group, mengiklankan produk, dan masih banyak lainnya.

Mayoritas keluarga yang memiliki ekonomi menengah keatas memiliki akses yang lebih luas dalam media sosial untuk berkomunikasi satu sama lain dalam keluarga. Jaringan media sosial digunakan untuk menunjang percakapan secara langsung, informasi-informasi yang ada dibelahan dunia ini sekarang ada di media sosial.<sup>152</sup> Ada beberapa dampak positif dan negatif media sosial dalam rumah tangga :

#### a. Dampak Positif

- 1) Mempererat silaturahmi: Dalam hal bersilaturahmi, penggunaan media sosial ini sangat cocok untuk dapat berinteraksi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya.

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ  
الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَغْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ<sup>153</sup>

Artinya: Dari Jubair Ibnu Muth'im Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan (silaturahmi)."

<sup>151</sup> Yasir, *Perencanaan Komunikasi*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2011), hlm.174.

<sup>152</sup> Al Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Op.Cit*, hlm. 388.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm 389.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan, banyak media sosial yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan, hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis. Isntansi pendidikan saat ini banyak yang memanfaatkan media sosial dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- 3) Menyediakan informasi yang tepat dan akurat, kita dapat mengakses kejadian yang terjadi di dunia luar dengan menggunakan internet melalui media sosial, akan tetapi perlu juga kehati-hatian dalam menerima informasi karna saat ini banyak informasi yang tidak benar yang juga ikut tersebar.
- 4) Menyediakan ruang untuk berpesan positif, Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. Contohnya dalam hal ceramah keagamaan.
- 5) Mengakrabkan hubungan pertemanan, Media sosial akan mengakrabkan suatu pertemanan, kala seseorang malu bertanya di dunia nyata. Dengan adanya sosial media menjadikan yang jauh terasa dekat sehingga terjalin hubungan baik meskipun jarak yang berjauhan<sup>154</sup>

#### b. Dampak Negatif

- 1) Manusia menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata.

<sup>154</sup> Dianasabily.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-dan-negatif.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Situs jejaring sosial akan membuat individu lebih mementingkan diri sendiri.
- 3) Tidak adanya aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial.
- 4) Situs jejaring sosial menjadi peluang bagi orang untuk melakukan tindakan criminal.
- 5) Pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela dan mudah beredar dikalangan masyarakat luas
- 6) Penipuan, hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu.<sup>155</sup>

#### 4. Dasar Hukum Menggunakan Media Sosial menurut Hukum Islam

Facebook dan situs-situs yang lainnya serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru. Artinya internet belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, internet ada pada zaman modern seperti sekarang. Jadi tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs tersebut. Akan tetapi kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)." Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-

---

<sup>155</sup> Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, *Journal For Islamic Law*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2015), hlm. 88.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.”<sup>156</sup>

Adapun situs yang haram hukumnya untuk diakses adalah situs yang mengandung unsur pornografi. Sedangkan situs-situs seperti facebook, instagram boleh mengaksesnya dan menjadi anggota didalamnya karena facebook ini bisa membuat penggunanya untuk selalu melakukan aktifitas silaturahmi dengan teman dan saudara setiap saat walaupun jarak mereka sangat jauh tanpa memakan biaya. Ini salah satu bukti bahwa media sosial dapat dijadikan media untuk menjaga silaturahmi antar satu pengguna dengan pengguna lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menggunakan media sosial adalah kembali kepada pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka media sosial pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika media sosial digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita menggunakannya.<sup>157</sup>

#### B. Keluarga dalam Islam

##### 1. Pengertian Keluarga

<sup>156</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

hal. 45

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah keluarga berasal dari terjemahan *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris).<sup>158</sup> Istilah keluarga dalam arti mendalam adalah sanak saudara atau anggota kerabat dekat.<sup>159</sup> Keluarga dalam Kamus Besar Indonesia memiliki beberapa pengertian; a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapakbeserta anak-anaknya, b) Orang yang menjadi penghuni rumah yang menjaditanggungan c) Sanak saudara d) Satuan kekerabatan yang sangat vital dalam kekerabatan. Keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antrara kelurga sedarqah dan kelurga kerena terjadinya perkawinan.<sup>160</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>161</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Keluarga dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang juga bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ali* dan *asyir*.

Kata *ahlun* berasa dari kata *ahila* yang berarti senang, suka atau marah, menurut pendapat lain, *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang artinya

<sup>158</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51

<sup>159</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet.III, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 34.

<sup>160</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Basional Depertemen Hukum dan HAM RI, Jakarta : 2009, hlm.43

<sup>161</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 676

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah. Secara lebih luas *ahlan* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau negara.<sup>162</sup>

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang pengaruh pada keluarga. *Ahli bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (QS. al-Ahzab: 33) :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan janganlah kamu berhias secara berlebihan dan bertingkah laku layaknya orang Jahiliyah terdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>163</sup>

Keluarga memiliki potensi menciptakan cinta dan kasih sayang antara setiap anggota keluarga. Keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>164</sup>

Secara psikologi, keluarga diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama melalui pernikahan yang sah dan memiliki komitmen atas dasar nama cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesamaan paham,

<sup>162</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Rihlah, 2006), hlm.

<sup>163</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : CV Darussunnah : 2019), hlm. 423

<sup>164</sup> Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>165</sup>

Menurut Ulfatmi, keluarga merupakan satu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga terbentuk dari sepasang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, berdasarkan keyakinan bersama yang dilengkapi dengan kasih sayang yang bertujuan untuk meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>166</sup>

Dengan demikian, disimpulkan bahwa keluarga adalah unit organisasi terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang memiliki ikatan pertalian yang sah dan kuat. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluargapun berhak mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan. Dalam al-Qur'an terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hal tercela, Keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal

---

<sup>165</sup> Ibid, hlm. 43

<sup>166</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan manusia dan berjalan menurut cara Islam dalam mentaunkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan seluruh alam semesta.<sup>167</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami-istri adalah sesuatu yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seseorang dari orang lain. Dalam hubungan suami istri hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Suatu pernikahan yang sah, dengan sendirinya telah memikat suami dan istri dalam suatu kesatuan keluarga. Masing-masing suami istri mesti menjaga hak dan kewajibannya. Penetapan hak dan kewajiban suami istri tersebut sebagai usaha untuk mewujudkan misi pernikahan dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, itulah sebabnya penetapan hak dan kewajiban tersebut harus didasari oleh prinsip keseimbangan dan keadilan antara suami-istri. Prinsip ini diajarkan dalam surat Al-Baqorah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*<sup>168</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, dan kewajiban yang

<sup>167</sup> Mahmud Muhammad al Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3

<sup>168</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Fiqh al- Islamy wa Adillatahu*, (Beirut: Dar al-Fikr 1389), cet.Ke-2, hlm.114

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunaikan oleh istri itu adalah hak suami. Dengan demikian *walahunna mitslu alladzi 'alaihinna* sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hak yang dimiliki istri seimbang dengan hak yang dimiliki oleh suami. Kemudian adanya kalimat *walirrijaali 'alaihinna darajah* yang oleh para mufassir dipahami dengan kelebihan (tanggung jawab/kewajiban) bukan kelebihan kemuliaan, menunjukan adanya suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami tetapi tidak dibebankan kepada istri.<sup>169</sup> Adapun kewajiban suami istri itu terbagi kepada dua macam :

- a. Kewajiban yang bersifat mareri, kewajiban materi suami terhadap istri selain mahar yang diberikan pada waktu akad nikah adalah nafkah berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban suami untuk memberikan makan, pakain kepada istrinya berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan ayah mempunyai kewajiban memberi akan dan pakaian kepada para ibu dengan cara baik.*<sup>170</sup>

Sedangkan kewajiban memberikan tempat tinggal berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Wahai para suami, tempatkanlah para istrimu dimana kamu tinggal yang berdasarkan kemampuanmu dan kamu tidak boleh membuat susah dan menyempitkan mereka.*<sup>171</sup>

<sup>169</sup> Jalil al-Din al-Muhaally, *Qulyuby wa Amirah, Jilid III*, (Semarang: Makhtabah Putra, 1998), hlm. 206.

<sup>170</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 36

<sup>171</sup> Ibid, hlm. 559

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas, kewajiban suami memenuhi segala haknya karena adanya ikatan pernikahan yang sah. Bukan karena tugas reproduksi istri walaupun istri tidak menjalankan tugas reproduksi, suami tetap wajib menafkahinya dengan syarat:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri taat dan patuh pada perintah suami selama suami tidak memerintahkan berbuat buruk.
- 3) Istri memberikan pelayan seksual kepada suami, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.
- 4) Istri tidak menolak ajakan suami ketika diajak berpergian kecuali jika istri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya.
- 5) Antara suami istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.<sup>172</sup>

Kewajiban manafkahi tetap berlaku sekalipun istri adalah seorang perempuan kaya atau mempunyai penghasilan sendiri. Nafkah suami terhadap istri bukan hanya dibatasi pada tiga bidang pangan, sandang dan papan saja, tetapi juga meliputi biaya-biaya pengobatan kebutuhan pokok lainnya.<sup>173</sup> Adapun ukuran pemberian nafkah dalam bentuk tiga hal di atas adalah berdasarkan kepada kadar kemampuan suami. Sesuai dengan surat al-Thalaq ayat 7 :

<sup>172</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif: 1980), juz II, hlm .110-111

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm.109



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ فَمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan kemampuannya. Dan Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan*<sup>174</sup>

Dipahami dari ayat di atas bahwa pemberian nafkah dari suami berdasarkan kemampuan, artinya kemampuan maksimal suami untuk mencari rizki, bila sudah dilakukan akan tetapi masih terjadi kekurangan dalam hal nafkah maka seorang istri tidak boleh menyusahkan mereka dengan tuntutan yang luar batasan kemampuan suami.

Ayat lain yang menjelaskann bahwa nafkah dibebankan kepada suami adalah suami mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki istri, yaitu hak menjadi pemimpin dalam keluarga.

Hak ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah tmemberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*<sup>175</sup>

#### b. Kewajiban imateri

- 1) Mengauli istri secara tepat dan patut (surat an-Nisa' : 19) :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>174</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia. *Op.Cit*, hlm. 559

<sup>175</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 85

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara baik.*<sup>176</sup>

- 2) Menjaganya dari perbuatan maksiat (surat at- Tahrim : 6 )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>177</sup>

Kewajiban khusus istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya yaitu :

- a) Taat dan patuh terhadap suami selama tidak ada perintah yang menyuruhnya kepada kemaksiatan.
- b) Melaksanakan tugas reproduksi, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui.

Hak dan kewajiban suami-istri secara bersama timbal balik dari pasangan suami-istri terhdapat yang lainnya di antaranya adalah :

- 1) Memperlakukan pasangannya dengan baik, tidak hanya meliputi fisik tetapi juga psikis. Perlakuan baik ini lebih dikenal dengan istilah mu'asyarah bial-ma'ruf. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka.*<sup>178</sup>

<sup>176</sup> Ibid, hlm. 81

<sup>177</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 561

<sup>178</sup> Ibid, hlm. 81

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Suami-istri saling menyayangi dan memuaskan kebutuhan seksual pasangannya. Dinyatakan dalam AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu para suami pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*<sup>179</sup>

Ayat ini menempatkan suami dan istri pada posisi yang sama.

Menurut Ulama mazhab Hanafi, istri boleh menuntut suami untuk melaksanakan persetubuhan, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, bagitupula sebaliknya, jika istri menuntut maka wajib bagi suami memenuhinya. Kepuasan seksual adalah hak dan kewajiban suami-istri. Seorang suami berhak memperoleh kepuasan seksual dari istrinya dan berkewajiban untuk memuaskan istrinya.

Begitu pula sebaliknya istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya dan berkewajiban untuk memuaskan suaminya. Pada gilirannya kapan semata-mata urusan satu pihak. Melainkan urusan berdua suami-istri.<sup>180</sup>

Untuk membuat pasangan tertarik, suami-istri pun dituntut bersama-sama untuk bisa berdandan. Tidak hanya istri yang hanya dituntut selalu berpenampilan cantik dihadapan suami, tetapi suami juga dituntut selalu gagah di hadapan istri. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

<sup>179</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 30

<sup>180</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Fiqh al- Islamy wa Adillatahu. Op.Cit.*, hlm. 6599.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Suami istri wajib saling melengkapi dan saling menjaga nama baik pasangannya. Sejalan dengan yang disyariatkan surat al-Baqarah ayat 187. Menurut Quraish Shihab, betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapa lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya, suami istri juga begitu, sehingga mereka harus berusaha untuk saling melengkapi tidak hanya itu, ayat ini juga memerintahkan suami-istri yang masing-masing punya kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya, sebagai mana pakain penutup aurat (kekurangan) pemakaiannya.<sup>181</sup>

4) Suami istri saling melibatkan pasangan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga. Dipahami dari firman Allah SWT Al-Thalaq ayat 6 :

وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاذَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: *Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.*<sup>182</sup>

5) Suami istri saling menjaga diri dari dan keluarga dari kemaksiatan. Sejalan dengan surat al-Tahrim ayat 6.

6) Suami istri saling menjaga harta masing-masing, harta bersama, dan harta pasangan memang dalam beberapa sumber tidak dikenal istilah harta bersama. Pada dasarnya, harta suami dan istri terpisah, dan menjadi milik masing-masing surat An-Nisa' ayat 32.

<sup>181</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 209

<sup>182</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Islam: 2019), hlm. 559

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Timbulnya hubungan Mushaharah dengan keluarga pasangannya. Sauami haram menikahi mertuanya dan anak perempuan istrinya, begitu pula istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, dan seterusnya. Hubungan mushaharah memberikan makna yang lebih jauh dalam hubungan perkawinan, artinya orang tua pasangan menjadi muhrim selamanya terhadap menantunya, meskipun sudah terjadi perceraian anatar sauami istri, namun martua akan menjadi martua selamanya dengan haram menikahi mereka selamanya.
- 8) Saling mewarisi antara sauami dan istri. Apabila suami meninggal dunia, maka istri berhak mendapatkan harta peninggalan suaminya, begitu pula sebaliknya jika yang meninggal dunia istri, maka sauami berhak mendapatkan harta peninggalan istrinya.
- 9) Apabila dalam pernikahan memperoleh anak, maka suami dan istri berhak atas anak tersebut dengan status sebagai bapak dan ibunya. Oleh karena itu suami istri berkawajiban bersama-sama mengasuh, merawat dan mendidik mereka. Kewajiban mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak itu bukan hanya merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja. jika selama ini masyarakat menekankan kewajiban mengasuh, merawat dan msndidik anak-anak itu hanya di pundak ibu, maka tindakan itu salah besar dan tidak sesuai dengan al-Qur'an surat al-Luqman ayat 13-19 yang mengisyaratkan

bahwa bapak mempunyai peran penting dalam pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak.<sup>183</sup>

#### **D. Fungsi Keluarga dalam Sosiologi**

Menurut ilmu sosiologi, terciptanya keluarga mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spritual, dan mental). Secara khusus tujuan dan fungsi keluarga dijelaskan sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya yang meliputi fisik (makan dan minum), psikologi (disayangi/diperhatikan, spritual/ agama, dan sebagainya). Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi setiap anggota, dan untuk menunjang keperluan kehidupan setiap anggota keluarganya yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah serta mampu memahami kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.<sup>184</sup>
2. Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni menjelaskan bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur/hierarki yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi

<sup>183</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika, 1990), hlm. 65.

<sup>184</sup> Landis, dikutip dari Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, Hereinikk. [ma.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf](http://ma.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf). diakses. 26 januari 2015, hlm 2



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para anggota dan untuk memelihara kebiasaan/budaya masyarakat yang lebih luas.<sup>185</sup>

3. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN, 1996) menyebutkan ada delapan kewajiban fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yang terdiri atas fungsi: (a) Keagamaan, (b) Sosial, (c) Budaya, (d) Cinta kasih, (e) Perlindungan, (f) Reproduksi, (g) Sosiologi dan Pendidikan, (h) Ekonomi, dan (1) Pembinaan Lingkungan.<sup>186</sup>
4. Menurut United Nations fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami-istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosiologi dan pendidikan dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.<sup>187</sup>
5. Menurut Mattensich dan Hill fungsi keluarga terdiri atas pemeliharaan fisik sosiologi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan pendewasaan anggota keluarga melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.
6. Rice dan Tucker menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan

<sup>185</sup> Herien Puspitasari dan Tin Heraawati, *Sistem dan Dinamika Keluarga*, (Bogor: Fema Press, 2009), hlm.16

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm.19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi instrumental dan fungsi manajemen sumber daya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui produksi dan sosialisasi anak dan dukungan serta perkembangan anggota keluarga.<sup>188</sup>

Tujuan dibentuknya keluarga oleh sebagian orang untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijadikan oleh keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik yang terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

Selanjutnya Menurut Djuju Sudjana, ada tujuh macam fungsi keluarga antara lain:

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis ini yang membedakan

---

<sup>188</sup> Herien Puspitasari dan Tin Heraawati, *Sistem dan Dinamika Keluarga*, (Bogor: Fema B, 2009 ), hlm 20

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.<sup>189</sup>

b. Fungsi edukatif.

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual dan professional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*<sup>190</sup>

Fungsi edukatif merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran reasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun

<sup>189</sup> Mahmud Muhammad al Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3

<sup>190</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Al-Mad, 2019), hal. 561



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua. Dalam hadist Nabi ditegaskan:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُنِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ (رواه المسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari az-Zubair dari az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orangtuanyalah yang akan membuatnya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Muslim).<sup>191</sup>*

#### c. Fungsi religius.

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Luqman: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia mengajari anaknya: "Hai anakku, janganlah kamu menduakan Allah, Sesungguhnya menduakan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>192</sup>*

Keluarga merupakan awal mula seorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhanannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah

<sup>191</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Jilid XI, Terj. Fathoni Muhammad dan Futuhal Arifin, (Jakarta: Darus Sunah, 2011), hlm. 885

<sup>192</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Samad, 2019), hlm. 413

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan disiplin, dan membentuk kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d. Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

e. Fungsi sosialisasi

Berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan keejukan dan melepas leah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang.

g. Fungsi ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang dimiliki.

h. Fungsi Agama

Fungsi ini untuk membangun insan yang Agamis yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga berkawajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama.

Melihat dari beberapa fungsi keluarga, nampak bahwa keluarga keluarga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan hidup, pendidikan pertama yang diawali pada keluarga, oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus ikut serta dalam memelihara fungsi-fungsi keluarga demi terciptanya keharmonisan keluarga.

i. Fungsi keluarga sebagai sumber nilai, sikap, dan norma

Nilai merupakan sikap dan perasaan yang diperhatikan oleh perorang, grup, ataupun masyarakat secara keseluruhan tentang baik dan buruk, benar salah, suka atau tidak suka, dan sebagainya. Norma adalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangkaian peraturan umum mengenai tingkah laku manusia yang menurut penilaian masyarakat dianggap baik atau buruk.

#### j. Fungsi Pendidikan

- Menyekolahkan anak supaya mempunyai penguatan, keterampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
- Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang memenuhi peranan sebagai orang tua.
- Mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 13-15 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada

*pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>193</sup>

Ayat di atas, mengisyaratkan pada orang tua dalam mendidik anaknya hendaklah seperti Luqman. Tahap awal mendidik anak adalah dengan mengenalkannya kepada Allah SWT dan memantapkan tauhidnya. Setelah memberikan pendidikan pada anak masalah iman, barulah ajarkan terkait ibadah, hal-hal sosial, dan ilmu-ilmu hasanah yang berguna lainnya.<sup>194</sup>

#### E. Keharmonisan dalam Berkeluarga

Setiap pasangan suami istri tentu saja impian untuk membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia harmonis atau dalam Islam dikenal dengan keluarga yang *Sakinah mawaddah warrahmah* tidak dapat terwujud begitu saja tanpa adanya komitmen dari suami istri untuk mewujudkannya, tanpa adanya komitmen dari suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga keduanya benar-benar merasa damai dan bahagia atas pernikahan yang dijalani.<sup>195</sup>

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila antara suami istri hidup bahagia dengan ikatan yang disadari kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Artinya suami istri hidup di dalam ketenangan lahir batin dengan merasa cukup atas apa yang didapatkan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>196</sup>

<sup>193</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 413

<sup>194</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima, 2006), hlm. 17-18.

<sup>195</sup> Lubis Salim. *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit terangt.th), hlm. 8

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan pernikahan dapat di pertahankan, yaitu cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan amanah. Inilah tali tuhan yang dapat membuat perkawinan, sehingga bila cinta hilang, dan mawaddah putus, masih dan rahmat, dan walaupun rahmat ini tidak tersisa, masih ada amanah dan selama pasangan itu baragama, amanahnya terpelihara. Diperintahkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara baik dan layak kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*<sup>197</sup>

Dalam ayat ini dinyatakan bila tidak ada cinta lagi, maka jangan buru-buru melakukan perceraian, karena sesuatu yang tidak disenangi belum tentu tidak baik, boleh jadi dengan bersabar maka ada kebaikan yang tidak diduga balik semua itu.

Bila tidak ada cinta lagi, perekat yang kedua adalah mawaddah, kata-kata mawwadah tersusun dari huruf-huruf m-w-d-d-, maksudnya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Mawwadah adalah kelapangan dada dan kekosongtan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta, bukankah yang mencintai sesekali hatinya kesal sehingga cintanya menjadi pudar bukan putus. Tetapi yang bersemayam dihati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapangan dan kosong dari keburukan sehingga pintu-

<sup>197</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 20019), hlm. 81



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pintunyunpun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).<sup>198</sup>

Rahmat adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga menodorong yang bersangkutan untuk membedayakanya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami istri bersungguh-sungguh bahkan berusaha payah untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala rintangan yang meghadang.

Hukum Islam menyatakan, dalam rangka jalinan perkawinan bahkan betapa pun hebatnya seseorang pasti ia mempunyai kelemahan, dan betapa lemahnya seseorang, pasti ada juga unsure kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi. Diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 187 :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*<sup>199</sup>

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia kepada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus dapat berfungsi saling melengkapi kekurangan pasangan

<sup>198</sup> Ibrahim al-Baq'a', *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1996), hlm.209

<sup>199</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hlm. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, sebagaimana pakain menutup aurat (kekurangan) pemakainya.<sup>200</sup>

Istri adalah amanah yang bagi suami, suami pun amanah bagi istri. Tidak mungkin orang tuan akan merestui perkawinan tanpa ada rasa kasih dan sayang dan kepercayaan.

Kesedian seorang istri yang bersedia hidup dengan suami, istri rela meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti itu semua dengan kelelahan hidup bersama seorang lelaki asing yang menjadi suaminya, serta membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu merupakan hal yang sangat mustahil, kecuali istri merasa yakin bahwa kebahagiaanya dengan orangtuanya, dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan kepada suaminya dan itulah yang dinami Al-Qur'an *misaqan gholizha* (perjanjian yang amat kokoh).<sup>201</sup>

Salah satu pembuktian cinta adalah perkawinan, setelah cinta terwujud dalam perkawinan kemudian terbentuk keluarga. Keluarga adalah salah satu wadah aktualisasi cinta. Cinta dalam keluarga dapat berarti sikap dan perilaku yang memiliki dimensi kasih sayang, perhatian dan penghargaan.

Dimensi kasih sayang dapat terwujud salah satunya adalah dengan menerima seorang suami dan istri apa adanya. Dengan cara ini meskipun banyak kekurangan yang dihadapi suami atau istri, hal ini menyiratkan kasih sayangnya.

<sup>200</sup> Nawawi, Imam Muhyiddun, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999), juz 12, hlm. 229.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 230

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi perhatian dalam keluarga dapat terwujud dalam memberikan pujian, memenuhi janji, dan mengistimewakannya. Pujian yang dilontarkan secara tepat dan tulus akan memberikan efek yang lebih jauh dari pada kritikan, dan dapat menguatkan hubungan emosional suami istri. Mengistimewakannya dapat berupa memberikan oleh-oleh yang disenaginya pada hari-hari tertentu.

Dimensi penghargaan terhadap pasangan merupakan strategi khusus dalam membina kasih sayang. Setiap suami atau istri akan merasakan dihargai apabila dipuji atau dibanggakan dihadapan orang lain. Orang tua yang saling menghormati dan saling melihat hal yang positif pasangannya, lebih dihargai oleh anak-anak bahkan lingkungannya.<sup>202</sup>

Menurut Hawark Harkman, salah seorang guru besar psikologi asal Amerika, keterampilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Cinta saja tidak dapat menjamin keharmonisan rumah tangga bila masing-masing pasangan kurang terampil dalam menyelesaikan konflik disaat hubungan menghadapi masalah.<sup>203</sup>

Menjalankan hubungan suami istri memang tidak mudah, suami istri dituntut memiliki prinsip bahwa perkawinan disebut sesuatu yang aneh kerana menyatukan dua orang yang lahir dari latar belakang yang berbeda. Kemudian dalam perkawinan terdapat perbedaan, hal itu sangat wajar sebab perkawinan merupakan media yang berupaya untuk memperkecil perbedaan untuk

<sup>202</sup> Hendi Suhendi, *Pengantar Sosiologi Study Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 148.

<sup>203</sup> *Ibid.* hlm. 150.



mengapai persamaan. Perkawinan bukan media mencari-cari persamaan. Jika hal itu terjadi yang muncul di kemudian hari adalah perbedaan dan konflik.<sup>204</sup>

Demikianlah gambaran untuk mengujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis, perlu ditanamkan pada diri setiap anggota keluarga untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing yang sesuai dengan tuntunan agama sebagai pedoman menjalankan kehidupan berkeluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>204</sup> Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, ( Pekanbaru: UIN Press, 2011), hlm 71-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial. Kedudukan perceraian akibat media sosial, adanya penggunaan media sosial yang mengakibatkan perselingkuhan melalui pesan singkat, hilang cinta istri kepada suaminya yang berawal dari percecokan yang tidak ada berujung, adanya aplikasi media sosial yang di gunakan tidak pada tempatnya seperti *Handphone*, *WhatsApp*, *Via SMS*, *foto-foto*, dan *video call* dan sejenisnya. Rata-rata putusan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru di antaranya mengabulkan gugatan penggugat, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menyatakan tergugat yang telah terpanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya perkara menurut hukum, dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan kata lain terjadinya kasus perceraian yang di putuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru sebab terjadinya percecokan kemudharatan yang berkepanjangan yang merusaknya hati masing-masing suami istri bersikeras untuk berpisah tidak bisa di mediasi lagi, maka dari sinilah hakim memutuskan perkara perceraian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

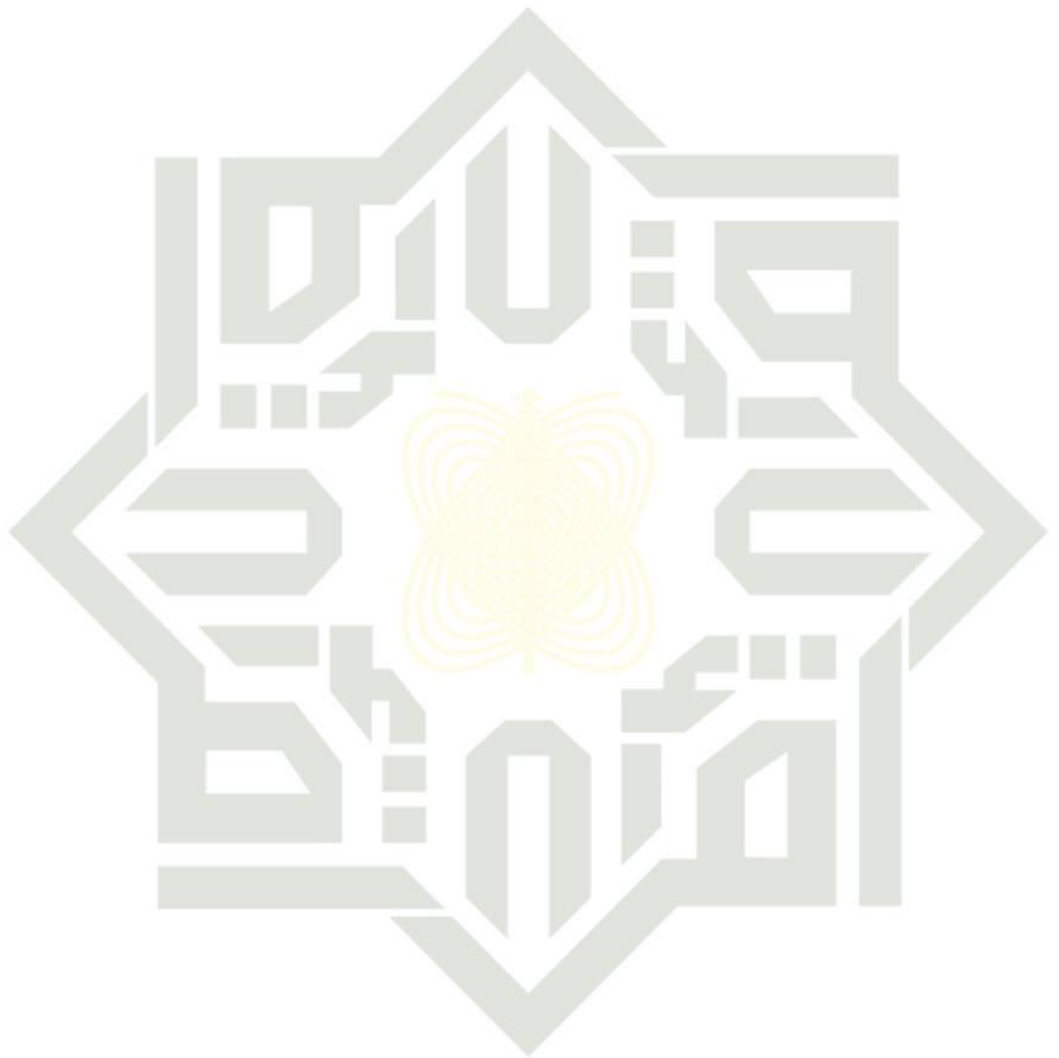
2. Tujuan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dapat disimpulkan sebagai berikut: Dasar pengambilan Hukum Islam dalam putusan perceraian akibat penyalahgunaan media sosial telah sesuai menurut hukum. Karena putusan perceraian sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:
  - a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
  - b. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri.
  - c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama agar memberikan dan memutuskan perkara berdasarkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dalam perkara perceraian.
2. Kepada pemerintah secepatnya merevisi Undang-Undang yang berlaku khususnya masalah keluarga, sesuai kondisi dan realita masyarakat Indonesia yang kekinian.
3. Hendaknya pasangan suami istri yang menggunakan media sosial, harus saling menghormati dan saling bekerja sama dalam semua hal di rumah tangga, bila ini berjalan dengan toleransi yang baik maka income yang membuat pasangan keluarga bahagia.



4. Hendaknya suami istri kembali memahami kewajiban dan hak-hak suami dan istri yang selama ini terlupakan, suami memberikan edukasi kepada istri sehingganya mempererat tali kasih sayang di antara suami dan istri.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abud. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakaha*, Bogor: Kencana, 2003, Cet-1.
- Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Renika Cipta , 2006.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Mesir : Dar at – Taufiqiyah litturots, t.th.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998.
- Ahmad Warson A-Imunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Sijistani Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiah , t.th), jilid.3.
- Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Renika Cipta , 2006
- AA Human Abdurrahman, *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan*, Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- As- Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012, Cet. ke-2.
- Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0* Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019.
- Al-Qawayni Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209 H/273 M.
- Amir Syarifuddin, *Garis garis besar fiqh* Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Antuni Wiyarsi, dkk, *Artikerl Ilmiah, Survai Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam RUMAH Tangga (KDRT) Wanita Kareir Di Daerah Istimewah* Yogyakarta.
- Ok Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta: PT. Lehtiar Baru VanHoeve, 1994.

Emzir Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, Ed.1, Cet. ke-2,

Fahriadi , (kasuba' Hukum) Wawancara salah satu pengawai Pengadilan Agama Pekanbaru, Jl.Parit Indah, tanggal 05 April 2019 Jam 02:25 Wib.

M. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika , 2009

Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, Pekanbaru: Alaf Riau, Agustus 2007.

Imu Abidin, *Raad al-Mukhtar*, Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th, jilid 4

Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*. Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra. 2011

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 117.

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Jumni Nelli, *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja ( Studi Kasus Istri yang mengajukan Cerai Gugat di Pekanbaru Agama Pekanbaru)*, Disertasi Uin Suska Riau Pekanbaru.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terj. Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2019.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara yang diterima, Jl. Parit Indah, Tanggal 23 September 2017 Jam 02:45 Wib.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2019 dan 2016 Jl.Parit Indah, tanggal 05 April 2019 Jam 02:25 Wib.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, penetapan putusan perkara register dan data rincian menurut usia Tahun 2016 Jl. Parit Indah, tanggal 21 April 2019 Jam 09:35 Wib.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Abu Zahra (1970), *Almujtama' al-insani fii zill al-Islam*, Bayrut: Dar al-Fikr, h. 9 Jurnal Fiqh, No.8 2011.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11 Jakarta: lentera, 2004.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Radliyah Nunung. *Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi Makin Meningkat-Islam Wiki*<http://islamwiki.blogspot.com/2011/12/parceraian-pasanganmUSLIM.html#ixzzImViXWYQb>, di Akses, 2-11-2013.

Radliyah Nunung. *Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi Makin Meningkat-Islam Wiki*<http://islamwiki.blogspot.com/2011/12/parceraian-pasanganmUSLIM.html#ixzzImViXWYQb>, di Akses, 2-11-2013.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Jakarta: dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 juni 2008, IKAHI.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000.

Rosleny Marniani, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2005, Cet. Ke- 1.

Rini Darmastuti, *Media Relations*, Yogyakarta: C.V Andi offset, 2012.

Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, Dar al-Fikr, t.th, jilid 3.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.

Sugoyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R/D*, Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 2008.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Soerjono Soekanto, *sosiologi keluarga*, jakarta: PT. Renika Cipta, 2009

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul ghafar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, Cet.ke-1.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007.

Elhami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.237.

Elhami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1986.

Somanto Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2001.

Yasir, *Perencanaan Komunikasi*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2011.

Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, *Journal For Islamic Law*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2015.

### Sumber penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Medan: Duta Karya, 1989

Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, Pekanbaru: t.p, 1995.

Pasal 2 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2019

### Sumber Internet dan Berita Harian

Laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara yang diterima, Jl. Parit Indah, Tanggal 23 September 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2 Fahriadi , (kasuba' Hukum) Wawancara salah satu pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru 019 dan 2016.

Dienasabily.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-dan-negatif.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2019

[http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial), diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Etika komunikasi dalam perspektif Islam dari [http://googleweblight.com/?lite?\\_url=http://](http://googleweblight.com/?lite?_url=http://), Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

<https://gilangnews.com/news/detail/6784/602-istri-di-pekanbaru-minta-cerai-mui-akibat-penyalahgunaan-media-sosial>. Diakses 13 juli 2020.

Laporan tahunan tentang kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru, Keadaan Perkara, Hlm 7-8.

#### Sumber Undang-undang dan Peraturan lainnya

Undang- undang Pokok Perkawinan

Undang- undang Pokok Perkawinan Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2000.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**MUHAMMAD YASRI MAR**, lahir Air Tiris, 05

Desember 1993. Penulis menempu pendidikan formal di Sekolah Dasar 001 Air Tiris pada tahun 2000, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tanawiyah Suwasta Pondok Pesantren Islamic Centre Al- hidayah Kampar pada tahun 2007, melanjutkan Madrasah Aliyah Pendiudikan Keagamaan Pondok Pesantren Islamic Centre Al- hidayah Kampar 2013. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan studi strata S1 di Universitas Isalm Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Keluarga Islam.

Selanjutnya sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2017 dengan judul Skripsi “ Pelaksanaan Perceraian di Kalangan Pasangan Usia Dewasa Awal DiTinjau Dari Hukum Islam”. Pada tahun 2017 akhir penulis secara resmi menyelesaikan studi strata S1 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Februari 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga (HK) dalam proses ujian tesis dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengnai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial.*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.